



# LAPORAN KINERJA

*BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur*  
TAHUN 2024



INDEPENDENSI

INTEGRITAS

PROFESIONALISME



**LAPORAN KINERJA**  
**BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**TAHUN 2024**

**INDEPENDENSI-INTEGRITAS-PROFESIONALISME**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami bisa menyelesaikan Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024. Laporan ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur atas pelaksanaan kinerja pada Tahun Anggaran 2024 yang penyusunannya didasarkan pada Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 286/K/X-XIII.2/6/2017 tentang Pelaporan Kinerja Pada Unit – Unit Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

Capain kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur diukur berdasarkan target 13 Indikator Kinerja Utama yang tertuang dalam pernyataan komitmen Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Kami mengucapkan terima kasih kepada para pejabat struktural dan para pegawai yang telah turut serta memberikan kontribusi capaian kinerja. Kami berharap capaian kinerja pada Tahun 2024 ini dapat dijadikan bahan evaluasi bersama atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehingga dapat memaksimalkan capaian kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, kami berharap semoga Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan masukan capaian kinerja Auditorat Utama Keuangan Negara VI dan dapat berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Samarinda, 30 Januari 2025

**Kepala Perwakilan**

**Agus Priyono S.E., M.Si., Ak, CA, CSFA, CFrA, ERMAP**

**NIP 197204211998031003**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GRAFIK.....	iv
DAFTAR DIAGRAM .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tugas dan Fungsi .....	2
C. Struktur Organisasi .....	4
D. Sumber Daya.....	6
E. Isu Strategis.....	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	15
A. Perencanaan Strategis .....	15
B. Target Kinerja .....	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	23
A. Hasil Evaluasi AKIP .....	23
B. Capaian Kinerja .....	24
C. Analisis Efisiensi .....	59
D. Perubahan Budaya Kerja.....	64
E. Realisasi Anggaran .....	66
F. Inovasi.....	67
G. Penghargaan.....	71
BAB IV PENUTUP .....	75

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Anggaran, rincian <i>output</i> (RO), dan indikator kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.....	10
Tabel 2. Indikator dan Target Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.....	17
Tabel 3. Rencana Aksi Pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	18
Tabel 4. Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 .....	25
Tabel 5. Perbandingan Realisasi Tahun Pelaporan dengan Target Lima Tahun .....	26
Tabel 6. Daftar Pemeriksaan Tahun 2024 pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur .....	28
Tabel 7. Target, Realisasi, dan Capaian IKU 1 pada Periode Renstra Tahun 2020-2024.....	30
Tabel 8. Target, Realisasi, dan Capaian IKU 2 pada Periode Renstra Tahun 2020-2024.....	33
Tabel 9. Target, Realisasi, dan capaian IKU 3 pada Periode Renstra Tahun 2020-2024.....	35
Tabel 10. Target, Realisasi, dan Capaian IKU 4 pada Periode Renstra Tahun 2020-2024.....	38
Tabel 11. Target, Realisasi, dan Capaian IKU 5 pada Periode Renstra Tahun 2020-2024.....	40
Tabel 12. Target, Realisasi, dan Capaian IKU 6 pada Periode Renstra Tahun 2020-2024.....	42
Tabel 13. Target, Realisasi, dan Capaian IKU 7 pada Periode Renstra Tahun 2020-2024.....	44
Tabel 14. Target, Realisasi, dan Capaian IKU 8 pada Periode Renstra Tahun 2020-2024.....	46
Tabel 15. Target, Realisasi, dan Capaian IKU 9 pada Periode Renstra Tahun 2020-2024.....	48
Tabel 16. Target, Realisasi, dan Capaian IKU 10 pada Periode Renstra Tahun 2020-2024...50	
Tabel 17. Pelaksanaan Aktivitas Manajemen Pengetahuan.....	50
Tabel 18. Target, Realisasi, dan Capaian IKU 11 pada Periode Renstra Tahun 2020-2024...54	
Tabel 19. Target, Realisasi, dan Capaian IKU 12 pada Periode Renstra Tahun 2020-2024...56	
Tabel 20. Target, Realisasi, dan Capaian IKU 13 pada Periode Renstra Tahun 2020-2024...58	
Tabel 21. Upaya Efisiensi yang Dilakukan pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Berkaitan dengan Capaian Indikator Kinerja.....	61
Tabel 22. Penjabaran Core Values BERKINERJA dan Moto Memuaskan .....	65
Tabel 23. Perbandingan Realisasi Anggaran, Rincian <i>Output</i> (RO), dan Indikator Kinerja RKP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.....	66
Tabel 24. Perbandingan Realisasi Anggaran, Rincian <i>Output</i> (RO), dan Indikator Kinerja RKSP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 .....	67

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan.....	12
Grafik 2. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.....	13
Grafik 3. Tren Skor Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur .....	24

## DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1. Persentase SDM BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Jabatan.....	7
Diagram 2. Persentase SDM BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Golongan.....	8
Diagram 3. Persentase SDM BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur .....	8
Diagram 4. Persentase SDM BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur .....	9
Diagram 5. Anggaran BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur .....	9



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.....	6
Gambar 2. Pelaksanaan Diklat di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur .....	14
Gambar 3. Visualisasi Renstra BPK 2020-2024.....	15
Gambar 4. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kinerja dan Kepatuhan Semester II Tahun 2024 .....	31
Gambar 5. Kegiatan Cek Fisik Pemeriksaan Kinerja atas Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun Anggaran 2023 dan 2024 pada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan Instansi Terkait Lainnya di Sendawar. ....	32
Gambar 6. Pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Semester II Tahun 2024.....	36
Gambar 7. Cek Fisik Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT) Tahun 2023 s.d. Triwulan III Tahun 2024 pada Pemerintah Kota Samarinda di Samarinda .....	38
Gambar 8. Ruang PIK.....	41
Gambar 9. Pemeriksaan Kinerja atas Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun Anggaran 2023 dan 2024 pada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan Instansi Terkait Lainnya di Sangatta.....	43
Gambar 10. Kegiatan Pengarahan Kepala Perwakilan dalam rangka Pemeriksaan Pendahuluan Tematik Kinerja dan DTT Semester II Tahun 2024 .....	45
Gambar 11. Rapat Evaluasi Kegiatan .....	47
Gambar 12. Verifikasi Lapangan Tim Penilai WBBM KemenPAN-RB .....	53
Gambar 13. BPK Goes to School di SMKN 1 Balikpapan.....	55
Gambar 14. Pelaksanaan Diklat Penulisan Berita dan Publikasi pada Media Sosial .....	57
Gambar 15. Rapat Evaluasi Kinerja Anggaran.....	59
Gambar 16. Hasil <i>Generate</i> Komposisi Tim .....	69
Gambar 17. Hasil Cetak <i>Template</i> Surat Tugas.....	70
Gambar 18. Halaman <i>Generate</i> Pernyataan Independensi.....	70
Gambar 19. Peraihan Predikat WBBM Tahun 2024 .....	71
Gambar 20. Penghargaan sebagai Terbaik IV Badan Publik Informatif .....	72
Gambar 21. Peringkat Pertama Lomba Souvenir Festival Seni dan Kreativitas BPK RI.....	72
Gambar 22. Piagam Penghargaan Peringkat Keempat Lomba Sadar Tertib Arsip BPK Tahun 2023.....	73
Gambar 23. Peringkat Pertama Kategori Pelayanan Informasi Publik.....	73
Gambar 24. Predikat Akreditasi A Perpustakaan pada Anugerah Kehumasan BPK RI Tahun 2024.....	74





## **BAB I PENDAHULUAN**

*LAPORAN KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN 2024*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pelaksanaan reformasi yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) khususnya bagi penyelenggara negara telah ditetapkan melalui UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) sebagai tindak lanjut atas Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Dalam bidang penyelenggaraan keuangan negara yang bersih dan bebas dari KKN dilakukan dengan mereformasi Undang-Undang tentang keuangan negara, menguatkan kelembagaan pemeriksa keuangan negara, dan mengamankan pengelolaan dan pemeriksaan keuangan yang transparan dan akuntabel yang ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat melalui terbitnya tiga paket Undang-Undang di bidang keuangan negara, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Dalam mengukur transparansi dan akuntabilitas, pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja maka setiap Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Laporan Keuangan dan Kinerja sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Amanat untuk menyusun Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang antara lain menyatakan bahwa laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD berdasarkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diselenggarakan oleh tiap-tiap entitas pelaporan dan/atau entitas akuntansi.

Secara teknis, ketentuan mengenai pelaporan keuangan dan kinerja Instansi pemerintah diatur dalam ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah tidak terkecuali Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dalam mencapai misi serta tujuan organisasi.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyusun lebih lanjut ketentuan tentang pelaporan kinerja berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 286/K/X-XIII.2/6/2017 tentang Pelaporan Kinerja Pada Unit–Unit Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan yang antara lain mengatur bahwa setiap satuan kerja Badan Pemeriksa Keuangan berkewajiban menyusun laporan keuangan dan laporan kinerja, termasuk di dalamnya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur disusun berdasarkan Sistem Perencanaan, Implementasi, Evaluasi, Manajemen Kinerja (PRISMA-Kinerja), Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tahun 2020-2024, Rencana Strategis BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024, Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 beserta pengukuran dan pengelolaan data kinerja.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas satuan kerja BPK yang mengelola anggaran dengan mendasarkan pada kinerja anggaran, maka BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur menerbitkan Laporan Akuntabilitas Kinerja setiap tahunnya diikuti dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja tiap triwulannya dengan tujuan untuk memberikan informasi mengenai capaian target kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, mengungkapkan kendala-kendala yang dihadapi selama tahun pencapaian kinerja dan penyusunan langkah perbaikan untuk mencapai target kinerja, serta sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur pada periode berikutnya.

Metode penilaian pencapaian kinerja yang dipergunakan dalam SIMAK BPK RI dilaksanakan dengan cara membandingkan realisasi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan target IKU yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.

## **B. Tugas dan Fungsi**

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur berada di bawah Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Auditor Utama (Tortama) Keuangan Negara VI. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kota/Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi (AUI).

Sesuai dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut.

1. Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dengan mengidentifikasi Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan RIR BPK;
2. Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur;
3. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur;
4. Penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;
5. Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur;
6. Pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur;
7. Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur;
8. Penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur;
9. Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, yang akan dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
11. Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dengan aparat pengawasan internal pada entitas diperiksa;
12. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur;
13. Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
14. Penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
15. Penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;
16. Pengelolaan sumber daya manusia (SDM), keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;

17. Pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP) dan *Database* Entitas Pemeriksaan (DEP) pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur;
18. Pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur;
19. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur; dan
20. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

### **C. Struktur Organisasi**

Sesuai dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, struktur organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, terdiri dari:

1. Sekretariat Perwakilan;
2. Subauditorat Kalimantan Timur I;
3. Subauditorat Kalimantan Timur II; dan
4. Kelompok Pejabat Fungsional

Adapun penjabaran tugas dari tiap-tiap unsur pelaksana tersebut adalah sebagai berikut:

#### **1. Sekretariat Perwakilan**

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur. Sekretariat BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari:

- a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan;  
Unit kerja yang melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, dan menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Subbagian Sumber Daya Manusia;  
Unit kerja yang melaksanakan pengurusan layanan SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.
- c. Subbagian Keuangan;  
Unit kerja yang melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.



- d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi;  
Unit kerja yang melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.
  - e. Subbagian Hukum;  
Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.
2. Subauditorat Kalimantan Timur I  
Subauditorat Kalimantan Timur I mempunyai tugas pada lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda, Kota Bontang, Kota Balikpapan, Kabupaten Paser, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk antara lain merumuskan rencana kegiatan, mengusulkan tim pemeriksa, melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan, mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah, menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan, mengevaluasi kegiatan pemeriksaan, mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS, melakukan pembahasan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan, serta melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan.
  3. Subauditorat Kalimantan Timur II  
Subauditorat Kalimantan Timur II pada lingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas mempunyai tugas antara lain merumuskan rencana kegiatan, mengusulkan tim pemeriksa, melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan, mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah, menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan, mengevaluasi kegiatan pemeriksaan, mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS, melakukan pembahasan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan, melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan.
  4. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

Adapun bagan struktur organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur

## D. Sumber Daya

### 1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berada pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan bezzeting pegawai periode 31 Desember 2024 sebanyak 130 orang yang terdiri dari 107 Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan 23 Pegawai Tidak Tetap sebagai berikut.



- a. Pejabat Struktural sebanyak 9 orang yaitu: Kepala Perwakilan, 2 orang Kepala Subauditorat, Kepala Sekretariat Perwakilan, Kepala Subbagian Keuangan, Kepala Subbagian Humas dan TU Kalan, Kepala Subbagian SDM, Kepala Subbagian Hukum, Kepala Subbagian Umum dan TI;
- b. Pejabat Fungsional Pemeriksa sebanyak 85 orang yang terdiri dari 1 orang Pemeriksa Madya, 11 orang Pemeriksa Muda, dan 73 orang Pemeriksa Pertama;
- c. Pejabat Fungsional Lainnya sebanyak 3 orang yang terdiri dari 1 orang Pranata Komputer Terampil, 1 orang Pranata Komputer Ahli Pertama/Pertama, dan 1 orang Pranata Arsiparis Ahli Pertama;
- d. Pelaksana pada Kesekretariatan Perwakilan sebanyak 10 orang; dan
- e. Pegawai tidak tetap sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang yang terdiri dari 1 orang Dokter Umum, 1 orang Perawat, 15 orang Tenaga Satuan Pengamanan, 4 orang Pengemudi, 1 orang teknisi, dan 1 Resepsionis.

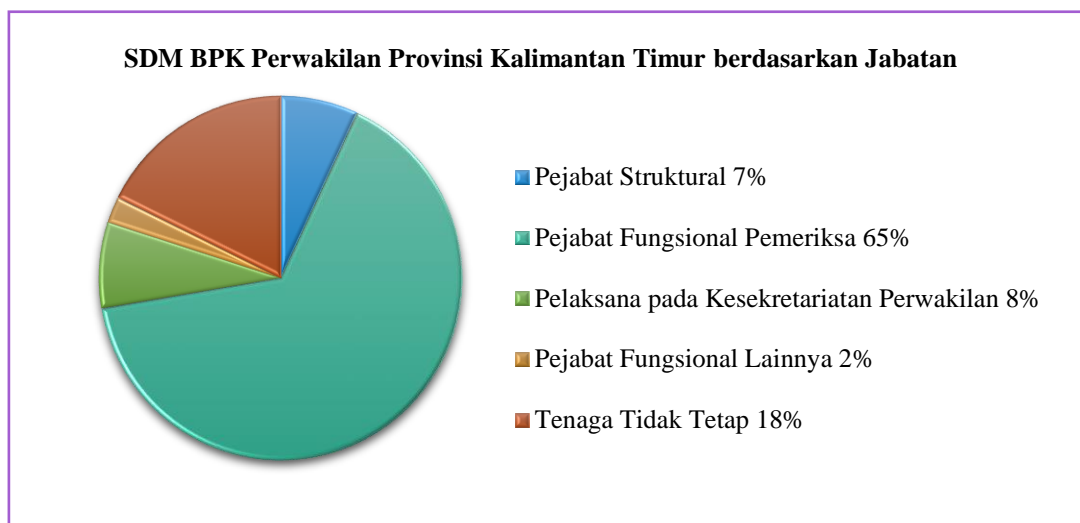


Diagram 1. Persentase SDM BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Jabatan

Berdasarkan tinjauan pangkat/golongan, PNS di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dapat dikategorikan sebagai berikut.

- a. Golongan IV/d sebanyak 1 orang;
- b. Golongan IV/b sebanyak 4 orang;
- c. Golongan IV/a sebanyak 3 orang;
- d. Golongan III/d sebanyak 14 orang;
- e. Golongan III/c sebanyak 5 orang;
- f. Golongan III/b sebanyak 26 orang;
- g. Golongan III/a sebanyak 45 orang;
- h. Golongan II/c sebanyak 8 orang; dan
- i. Golongan IX sebanyak 1 orang.

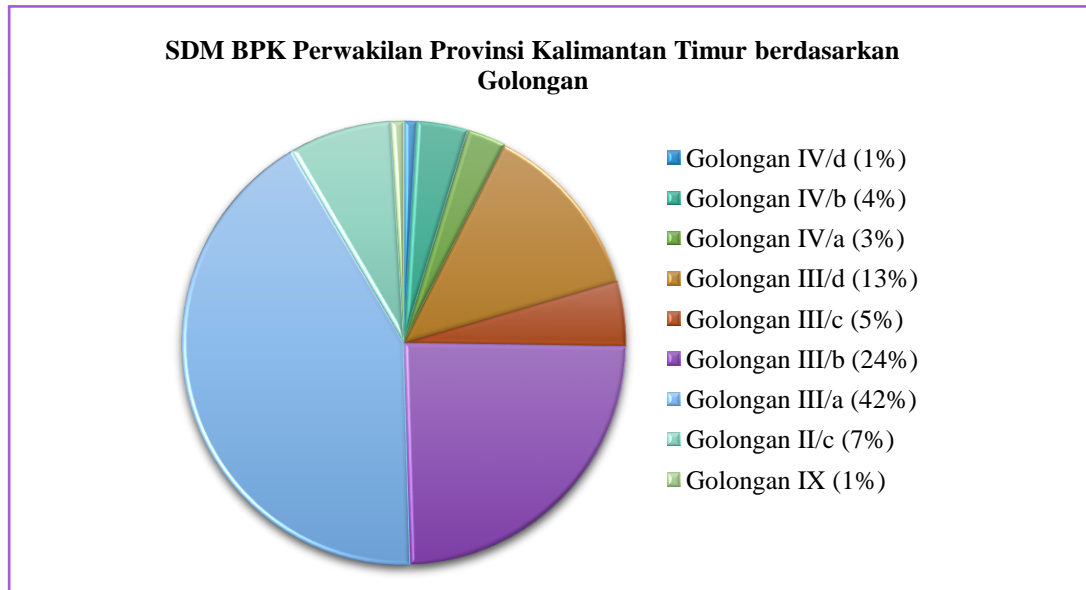


Diagram 2. *Persentase SDM BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Golongan*

Berdasarkan tinjauan jenjang pendidikan, PNS di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dapat dikategorikan sebagai berikut.

- a. Jenjang S2 sebanyak 19 orang;
- b. Jenjang S1/D4 sebanyak 80 orang; dan
- c. Jenjang Sarjana Muda/D3 sebanyak 8 orang.

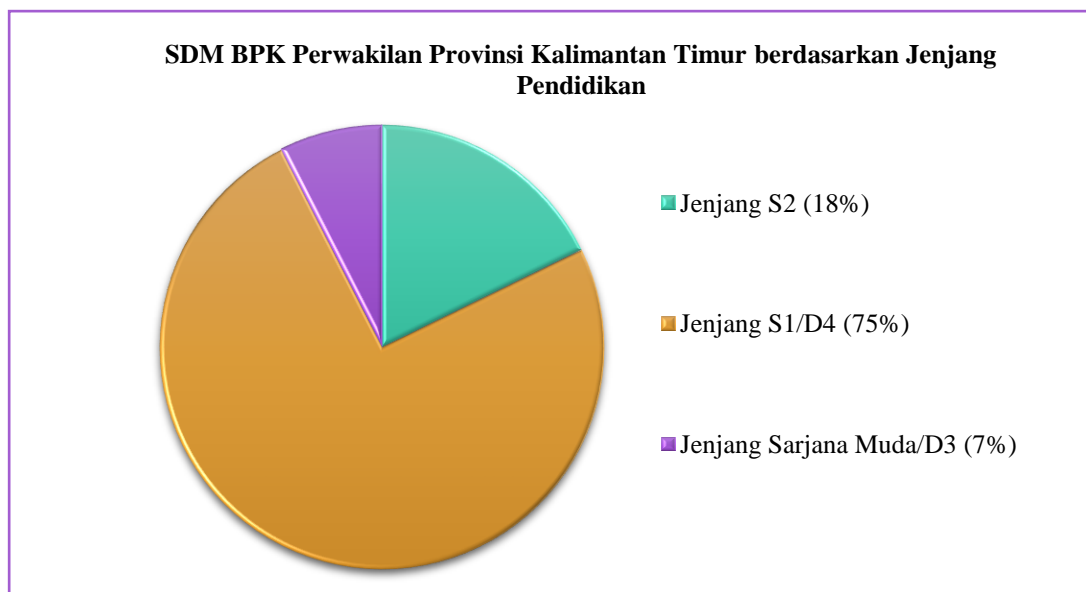
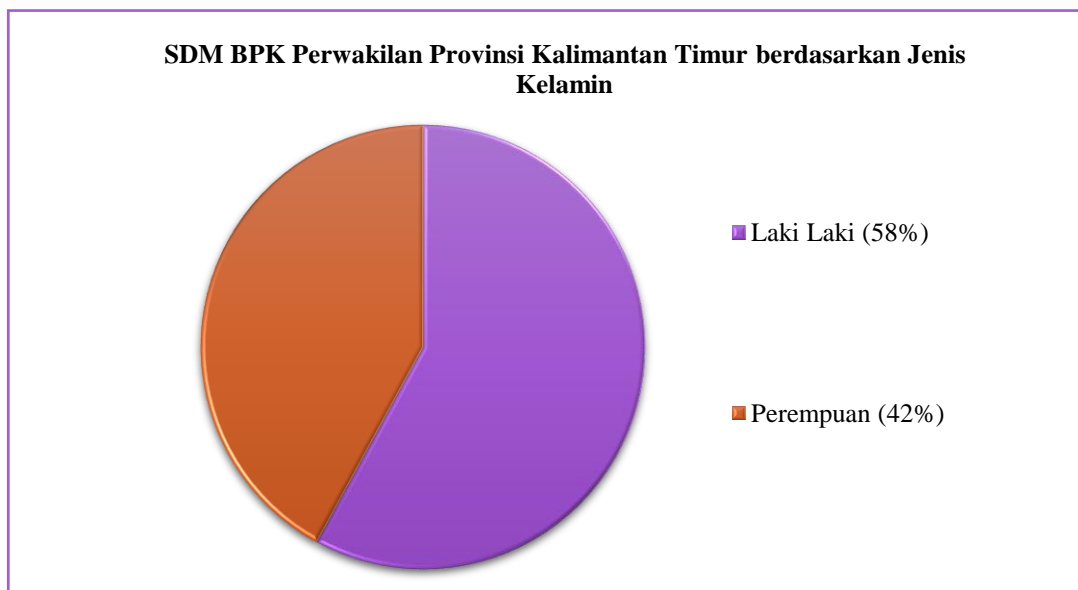


Diagram 3. *Persentase SDM BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Jenjang Pendidikan*

Berdasarkan tinjauan jenis kelamin, PNS di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dapat dikategorikan sebagai berikut.

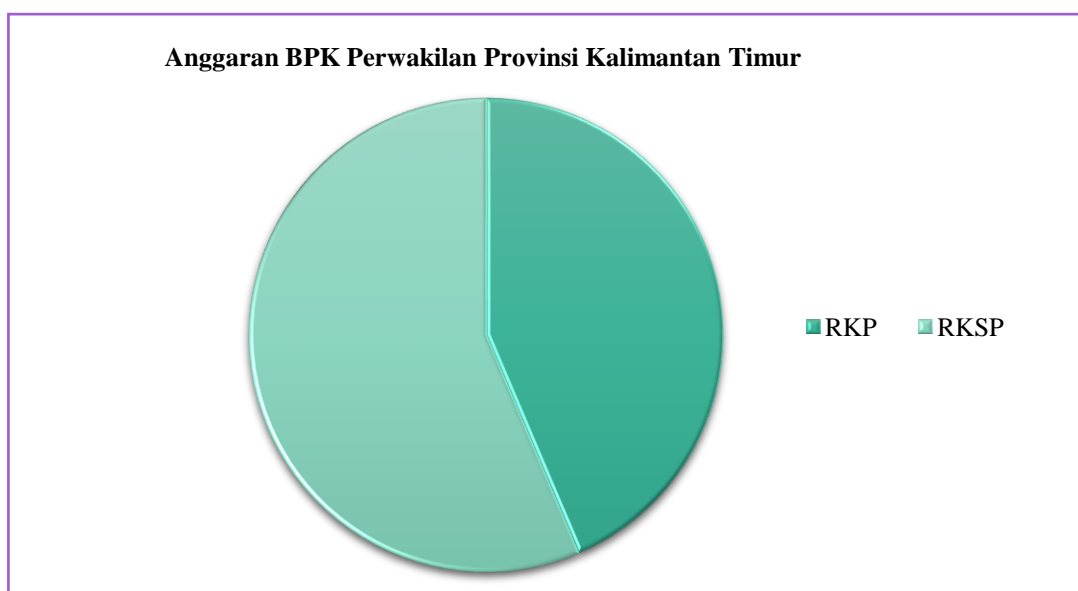
- a. Laki-Laki sebanyak 62 orang; dan
- b. Perempuan sebanyak 45 orang.



*Diagram 4. Persentase SDM BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Jenis Kelamin*

## 2. Sumber Daya Keuangan

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2024 memiliki satu program kegiatan yaitu pemeriksaan keuangan negara dan pemantauan penyelesaian kerugian negara sebesar **Rp25.667.742.000,00** yang dibagi menjadi kegiatan pemeriksaan berdasarkan rencana kerja pemeriksaan (RKP) sebesar **Rp11.195.576.000,00** dan kegiatan kesekretariatan berdasarkan rencana kerja sekretariat dan Penunjang (RKSP) sebesar **Rp14.472.166.000,00**.



*Diagram 5. Anggaran BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur*

Adapun perbandingan anggaran, rincian *output* (RO), dan indikator kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 sebagaimana Tabel 1. berikut.

Tabel 1. Anggaran, rincian *output* (RO), dan indikator kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

No	Uraian RO	Anggaran (Rp)	Volume Keluaran (Output)		Indikator Kinerja
			Target	Satuan	
1	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas bantuan keuangan partai politik pada BPK perwakilan	213.774.000,00	103	LHP	<b>RKP atas indikator:</b> 1. Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan 2. Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan 3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan 4. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional 5. Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan 6. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan
2	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	13.635.000,00	1	Laporan	
3	Sumbangan IHPS Perwakilan	136.401.000,00	2	Laporan	
4	Laporan Profil Entitas Perwakilan	32.830.000,00	11	Laporan	
5	Laporan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada BPK Perwakilan	438.435.000,00	22	Laporan	
6	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah pada BPK Perwakilan	151.017.000,00	22	Laporan	
7	Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan	1.152.281.000,00	12	Laporan	
8	LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur	9.057.203.000,00	21	Laporan	

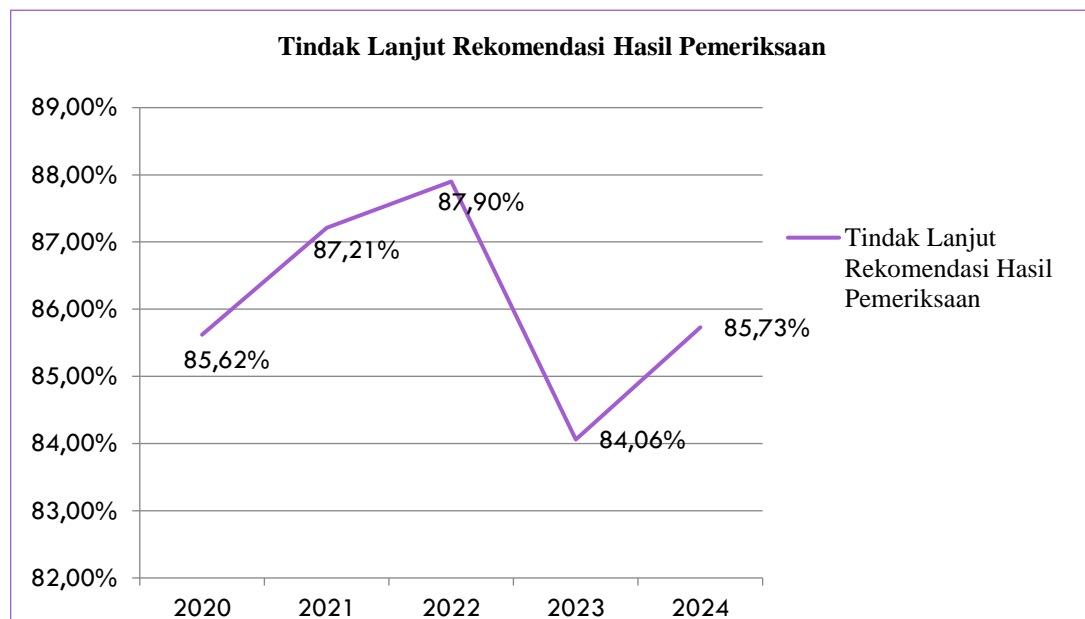
No	Uraian RO	Anggaran (Rp)	Volume Keluaran (Output)		Indikator Kinerja
			Target	Satuan	
					Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal
10	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	118.200.000,00	17	Unit	<u>RKSP atas indikator:</u> 7. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK 8. Hasil Evaluasi AKIP 9. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi 10. Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan 11. Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi 12. Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi 13. Tingkat Kinerja Anggaran
11	Layanan Perkantoran	12.160.972.000,00	1	Layanan	
12	Layanan Sarana Internal	334.070.000,00	45	Unit	
14	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	1.858.924.000,00	21	Laporan	
<b>Total</b>		<b>25.667.742.000,00</b>	<b>278</b>		

## E. Isu Strategis

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur telah merumuskan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 dengan memperhatikan isu strategis internal organisasi serta lingkungan strategis yang mencakup agenda pembangunan nasional, implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan/*sustainable development goals* (SDGs), dan perkembangan internasional terkait tata kelola keuangan negara dan praktik terbaik pengelolaan kinerja lembaga pemeriksa. Isu-isu strategis yang perlu menjadi perhatian pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur tersebut sebagai berikut.

1. Tingkat tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan oleh para pengelola keuangan daerah

Tingkat tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan merupakan salah satu bukti tingkat penerimaan *auditee* atas rekomendasi BPK melalui penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Peningkatan tingkat tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan perlu menjadi agenda perubahan dalam periode Renstra agar penerimaan *auditee* atas rekomendasi BPK dapat ditingkatkan sehingga mendorong peningkatan pemanfaatan, rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah serta penyelesaian ganti kerugian negara/daerah. Berikut Grafik 1 menggambarkan persentase tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.



Grafik 1. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

2. Peningkatan pemahaman para pemangku kepentingan atas tugas dan kewenangan BPK

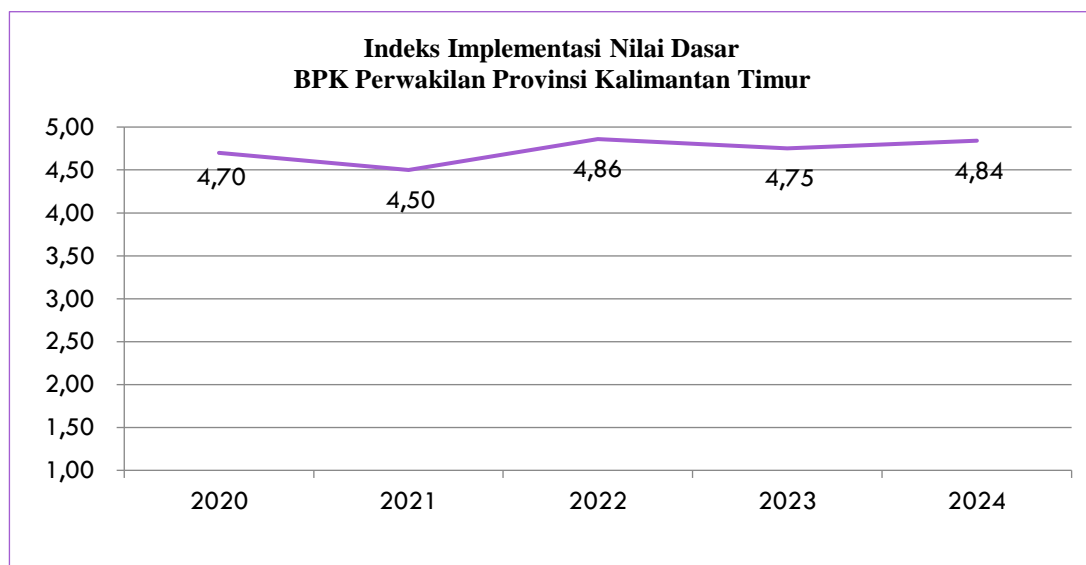
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur perlu meningkatkan komunikasi kepada para pemangku kepentingan termasuk media massa dalam memberikan pemahaman akan peran, tugas, dan kewenangan BPK melalui peningkatan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama, dan komunikasi dengan para pemangku

kepentingan di lingkungan BPK Perwakilan, peningkatan strategi pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, serta peningkatan pemahaman para *stakeholders* yang berkaitan dengan masalah hukum atau tindak pidana korupsi berkaitan dengan kewenangan dan mekanisme yang dimiliki BPK dalam hal penyampaian indikasi masalah pidana, pemeriksaan investigasi, penghitungan ganti kerugian negara/daerah, serta pemberian keterangan ahli dalam proses hukum.

3. Kredibilitas organisasi perlu dijaga dan terus ditingkatkan

Kredibilitas organisasi dilakukan melalui pencegahan intervensi dari berbagai pihak yang dapat mengganggu implementasi nilai dasar BPK yaitu Integritas, Independensi, dan Profesionalisme dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta didukung dengan pemberian motivasi, arahan dan teladan yang baik dari para pimpinan dalam mendorong penerapan nilai dasar BPK.

Berdasarkan hasil survei pengukuran indeks indikator kinerja dan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) BPK, indeks implementasi nilai dasar BPK yang mengukur tingkat pemahaman visi, misi, dan nilai dasar seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dengan skala 1 – 5 dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 tergambar pada Grafik 2 berikut.



Grafik 2. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur



#### 4. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di BPK

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dilakukan melalui kegiatan *workshop*, pendidikan dan pelatihan, *Focus Group Discussion* (FGD), *Knowledge Transfer Forum* (KTF) serta berbagai macam pelaksanaan aktivitas manajemen pengetahuan yang dapat mendorong pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan bagi pegawai BPK.



Gambar 2. Pelaksanaan Diklat di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur



## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

*LAPORAN KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN 2024*

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Perencanaan Strategis

Pada tanggal 3 November 2020, BPK mengeluarkan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis (Renstra) BPK Tahun 2020-2024 yang menyesuaikan periode perencanaan RPJMN 2020-2024. Kebijakan penyesuaian periode renstra ini bertujuan untuk menyelaraskan strategi pemeriksaan BPK dan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan periode program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Visualisasi Renstra BPK Tahun 2020-2024 sebagaimana pada Gambar 3.



Gambar 3. Visualisasi Renstra BPK 2020-2024

Sesuai yang tertuang dalam Renstra BPK Tahun 2020-2024, visi BPK 2020-2024 yaitu “Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara”. Melalui visi ini, BPK berupaya mengoptimalkan mandatnya untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri.

Sehubungan dengan upaya pencapaian tujuan negara dan mandat sesuai peraturan perundang-undangan, BPK menetapkan Misi sebagai berikut.

1. Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan;
2. Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan
3. Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Penyusunan Visi dan Misi pada Renstra BPK Tahun 2020–2024 tetap berpijak pada nilai-nilai dasar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab BPK sebagai berikut.

1. Independensi

Nilai independensi selalu dijunjung tinggi dalam pelaksanaan setiap tugas dan tanggung jawab, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam melaksanakan setiap penugasan pemeriksaan, bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.

2. Integritas

Nilai integritas dibangun dengan mengedepankan sikap yang jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

3. Profesionalisme

Nilai profesionalisme dikembangkan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan strategis BPK, maka BPK Perwakilan, termasuk di dalamnya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur mengemban amanat untuk melaksanakan Arah Kebijakan 1 yaitu “Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Secara Berkelanjutan” dengan menjalankan Strategi 2 yaitu “Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif”.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur telah menyusun Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 dan menetapkan Sasaran Kegiatan yang mendukung pelaksanaan Strategi 2, yaitu:

### **Sasaran Kegiatan**

#### **Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi**

Hal ini mendukung langsung pencapaian Sasaran Program Eselon I yaitu “Meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif” dan secara langsung mendukung pencapaian Sasaran Strategis BPK yaitu “Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi”. Sasaran kegiatan tersebut diturunkan menjadi dua sasaran satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut.

### **Sasaran 1**

#### **Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas**

Sasaran satuan kerja merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dengan mencerminkan hasil kegiatan satuan kerja. Melalui Sasaran 1 “Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas” tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur harus memastikan bahwa entitas pemeriksaan dan para pemangku kepentingan dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan dengan sebaik-baiknya



melalui pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan dan kesesuaian hasil pemeriksaan yang memenuhi harapan penugasan. Hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur diharapkan dapat berperan aktif dalam memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah sehingga dampak hasil pemeriksaan dapat dirasakan oleh seluruh pemangku kepentingan.

Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur juga berperan aktif memantau penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP), meningkatkan penyelesaian ganti kerugian daerah terhadap Bendahara, pengelola BUMD dan pengelola badan/lembaga lain yang mengelola keuangan daerah, mengusulkan bahan pendapat kepada BPK, melakukan penyelesaian unggah data hasil pemeriksaan untuk sumbangan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) BPK, melaksanakan pemutakhiran profil entitas, dan menyelenggarakan layanan administrasi pemeriksaan.

## Sasaran 2

### Meningkatnya Layanan Pemeriksaan

Sasaran 2 “Meningkatnya Layanan Pemeriksaan” mencakup pelaksanaan kegiatan layanan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur berupa layanan sarana internal, layanan prasarana internal, layanan manajemen internal perwakilan, dan layanan perkantoran.

## B. Target Kinerja

### 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renstra dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja merupakan bentuk komitmen pimpinan dalam hal ini Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur atas target kinerja yang telah ditetapkan. Indikator dan Target Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 sebagaimana pada Tabel 2 berikut.

*Tabel 2. Indikator dan Target Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024*

Sasaran Kegiatan, Sasaran, dan Anggaran	Indikator Kinerja		Target
Meningkatkan Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi (Rp25.667.742.000,00) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan Pemeriksaan Berkualitas</li> <li>• Meningkatkan Layanan Pemeriksaan</li> </ul>	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
	2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
	3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
	4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%

Sasaran Kegiatan, Sasaran, dan Anggaran	Indikator Kinerja		Target
	5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%
	6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
	7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (4,81)
	8	Hasil Evaluasi AKIP	AA (90,05)
	9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	98%
	10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
	11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)
	12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
	13	Tingkat Kinerja Anggaran	84,50%

## 2. Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja Tahun 2024

Dalam mencapai target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur menetapkan rencana aksi pelaksanaan perjanjian kinerja Tahun 2024 sebagaimana pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Rencana Aksi Pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024		Rencana Kegiatan			
		TW I	TW II	TW III	TW IV
I	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2023</li> <li>Meningkatkan QC dari PT dan PJ melalui laporan mingguan dan diskusi mingguan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemenuhan QA dan QC dalam pelaksanaan pemeriksaan Terinci atas Pemeriksaan LKPD TA 2023</li> <li>Melaksanakan pengukuran pemenuhan QA dan QC Pemeriksaan melalui lembar <i>checklist</i> QA dan QC atas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan Pemeriksaan Interim atas Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)</li> <li>Memperoleh evaluasi atas tingkat akurasi dan konsistensi dari Direktorat EPP atas LHP yang diterbitkan atas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemenuhan QA dan QA atas Pemeriksaan Kinerja dan PDTT</li> <li>Melaksanakan pengukuran pemenuhan QA dan QC Pemeriksaan melalui lembar <i>checklist</i> QA dan QC atas pemeriksaan kinerja dan PDTT</li> </ul>

Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024		Rencana Kegiatan			
		TW I	TW II	TW III	TW IV
			pemeriksaan kinerja dan PDTT	Pemeriksaan LKPD TA 2023 <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan evaluasi dan perbaikan atas hasil evaluasi EPP</li> </ul>	
2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat Koordinasi penyusunan rencana pemeriksaan Tahun 2024</li> <li>Merancang Harapan Penugasan atas Pemeriksaan LKPD TA 2023</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penilaian atas kesesuaian simpulan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD TA 2023 dengan harapan penugasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat Koordinasi penyusunan rencana pemeriksaan Semester II Tahun 2024</li> <li>Merancang Harapan Penugasan atas Pemeriksaan Kinerja dan PDTT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penilaian atas kesesuaian simpulan dalam LHP Kinerja dan DTT dengan Harapan Penugasan</li> </ul>
3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut (TL) melalui aplikasi SMP dan SIPTL, dan verifikasi validasi dokumen TL dan pembahasan status I dan IV atas PTLRHP TW IV 2023</li> <li>Pengusulan penetapan status I dan IV TLRHP TW IV Tahun 2023 ke Anggota VI melalui Auditor Utama (Tortama) Keuangan Negara (KN) VI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan Pembahasan TLRHP Semester I Tahun 2024 bersama seluruh entitas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut (TL) melalui aplikasi SMP dan SIPTL,</li> <li>Pengusulan penetapan status I dan IV TLRHP Semester I Tahun 2024 ke Anggota VI melalui Tortama KN VI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan Pembahasan TLRHP Semester II Tahun 2024 bersama seluruh entitas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur</li> </ul>
4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyampaian RKP Pemeriksaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengoordinasikan pemeriksaan Tematik Nasional berdasarkan isu strategis, RPJMN/D,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan Pemeriksaan Interim atas Pemeriksaan Tematik Nasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan Pemeriksaan Terinci atas Pemeriksaan Tematik Nasional</li> </ul>



Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024		Rencana Kegiatan			
		TW I	TW II	TW III	TW IV
			dan SDGs dengan Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) VI		<ul style="list-style-type: none"> <li>Menerbitkan LHP Tematik Nasional</li> </ul>
5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kompilasi Informasi Permintaan Pemeriksaan dari para pemangku kepentingan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengoordinasikan permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan dengan Tortama KN VI dan Anggota VI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Merencanakan pemeriksaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pemeriksaan</li> </ul>
6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan anggaran pemeriksaan tematik lokal</li> <li>Koordinasi dan konsultasi terkait kebijakan pemeriksaan tematik lokal kepada Tortama KN VI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi ke Pokja atas pelaksanaan pemeriksaan tematik lokal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan pemeriksaan interim</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan pemeriksaan terinci</li> <li>Evaluasi keterlibatan BPK Kaltim dalam pemeriksaan tematik lokal</li> <li>Melaksanakan TLHP atas pemeriksaan lokal</li> </ul>
7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoting pegawai yang mempunyai hubungan kepentingan dengan entitas pemeriksaan</li> <li>Pengarahan dan sosialisasi kepala perwakilan terkait nilai dasar BPK, visi, misi, dan budaya kerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Arahan Kepala Perwakilan terkait Independensi, Integritas, dan Profesionalisme dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemberian motivasi dan teladan dari pimpinan untuk mendorong penerapan nilai dasar BPK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pakta integritas pemeriksa terkait pemeriksaan terinci kinerja dan DTT</li> <li>Pelaksanaan Survei Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK</li> </ul>
8	Hasil Evaluasi AKIP	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan rencana aksi pencapaian kinerja tahun 2024</li> <li>Evaluasi Capaian Kinerja Semester</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan proses penilaian mandiri dan mengikuti proses revidi utama atas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluasi capaian kinerja Semester I Tahun 2024</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluasi hasil penilaian atas implementasi SAKIP Tahun 2023 dan melakukan tindak lanjut atas</li> </ul>

Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024		Rencana Kegiatan			
		TW I	TW II	TW III	TW IV
		II Tahun 2023 dan Pemenuhan permintaan data atas evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BPK Perwakilan oleh Itama	SAKIP BPK Perwakilan		rekomendasi Itama <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan LAK 2024</li> </ul>
9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mendorong pelaksanaan tupoksi layanan TI</li> <li>Inventarisasi kebutuhan pemanfaatan Teknologi Informasi (TI)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi dan/atau pendampingan serta pemantauan penggunaan TI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkoordinasi dengan Biro TI atas pemanfaatan TI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluasi atas pemanfaatan TI</li> </ul>
10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan Aktivitas Manajemen Pengetahuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan Aktivitas Manajemen Pengetahuan dan Merancang Usulan <i>Best Practice</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan Aktivitas Manajemen Pengetahuan dan penerapan <i>Best Practice</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan Laporan <i>Best Practice</i> dan Laporan Pelaksanaan Aktivitas Manajemen Pengetahuan</li> </ul>
11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan pemenuhan tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengkoordinasikan dan memenuhi kebutuhan komunikasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkoordinasi kepada para pemangku kepentingan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan survei kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi</li> </ul>
12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Merencanakan kebutuhan diklat</li> <li>Sosialisasi kalender diklat TW I dan usulan pelaksanaan diklat</li> <li>Melaksanakan diklat persiapan pemeriksaan LKPD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring jam diklat pegawai dan mengusulkan keikutsertaan diklat yang dilaksanakan oleh Badan/Balai Diklat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring jam diklat pegawai dan mengusulkan keikutsertaan diklat yang dilaksanakan oleh Badan/Balai Diklat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring jam diklat pegawai dan mengusulkan keikutsertaan diklat yang dilaksanakan oleh Badan/Balai Diklat</li> </ul>
13	Tingkat Kinerja Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi evaluasi pengelolaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluasi atas penyerapan tingkat kinerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluasi penyerapan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi kesiapan penyerapan</li> </ul>

Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024		Rencana Kegiatan			
		TW I	TW II	TW III	TW IV
		anggaran TA 2023 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan dokumen penganggaran dan pemantauan atas pelaksanaan realisasi anggaran</li> </ul>	anggaran TW I <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan atas revisi anggaran/rencana penarikan dana</li> </ul>	tingkat kinerja anggaran TW II	anggaran dan penyusunan Laporan Keuangan



### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

*LAPORAN KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN 2024*

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Hasil Evaluasi AKIP**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP dan/atau evaluasi Kinerja pada Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenangannya.

Inspektorat Utama (Itama) sebagai aparat pengawasan BPK memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unsur Pelaksana BPK salah satunya melakukan evaluasi atas Implementasi AKIP Tahun 2024 pada tiap satuan kerja yang ada di BPK dengan tujuan untuk:

1. memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
5. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Evaluasi dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Peraturan Menteri PANRB) Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang meliputi evaluasi atas empat komponen Akuntabilitas Kinerja yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Berdasarkan hasil evaluasi Itama, implementasi AKIP internal Tahun 2024 pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur memperoleh nilai sebesar **91,40** dengan predikat **AA (sangat memuaskan)**. Perolehan nilai ini mengalami peningkatan sebesar 0,90 jika dibandingkan nilai AKIP Tahun 2023 yaitu sebesar 90,50. Perolehan ini didukung oleh kerjasama para pejabat struktural dan para pegawai dalam mencapai target kinerja dan pencapaian *output* atas pelaksanaan kegiatan anggaran.

Dalam pencapaian nilai AKIP Tahun 2024, BPK Perwakilan telah berupaya untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya, yaitu dengan:

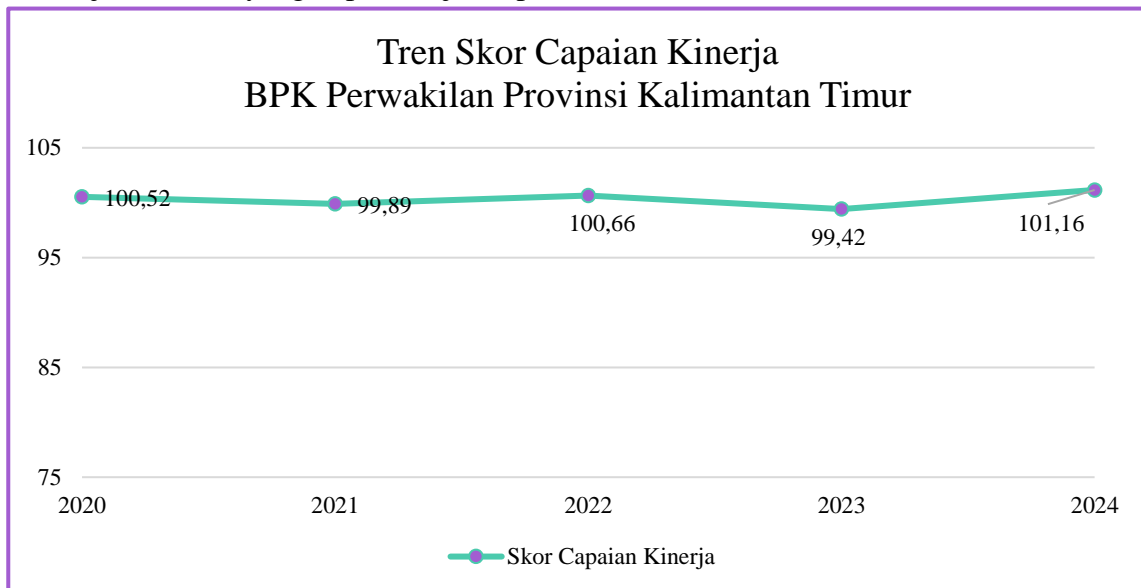
1. menyusun perencanaan kinerja yang berorientasi hasil, dengan indikator SMART, serta *cascading* sampai dengan level individu; dan
2. menyajikan seluruh informasi yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya.

Dalam upaya meningkatkan capaian implementasi SAKIP di masa mendatang, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur akan berupaya untuk tetap memperhatikan pemenuhan kriteria baik pada perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh BPK. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur akan berusaha meningkatkan kinerja dengan berkoordinasi dengan Direktorat PSMK dan Inspektorat Utama dalam upaya melakukan perbaikan guna meningkatkan capaian dari setiap komponen penilaian.

## B. Capaian Kinerja

Selama Tahun 2024, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan evaluasi dan perbaikan atas capaian kinerja tahun sebelumnya. Komitmen, kerja keras, dan usaha bersama yang dilakukan oleh seluruh jajaran pegawai di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur memberikan dampak yang besar bagi pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2024 memperoleh skor capaian kinerja senilai 101,16. Skor ini mengalami kenaikan jika dibanding dengan Tahun 2023, yaitu sebesar 99,42. Skor capaian kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 menunjukkan tren yang dapat disajikan pada Grafik 3 berikut.



Grafik 3. Tren Skor Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur

Dari Grafik 3 tersebut, terjadi kenaikan skor capaian kinerja pada Tahun 2024 dibandingkan dengan Tahun 2023 yang disebabkan oleh naiknya beberapa capaian skor IKU, yaitu:

1. IKU 1. Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan
2. IKU 6. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal
3. IKU 7. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK
4. IKU 9. Tingkat Pemanfaatan TI

## 5. IKU 13. Tingkat Kinerja Anggaran

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja selama periode Renstra Tahun 2020-2024, capaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2024 merupakan capaian dengan skor tertinggi yaitu 101,16.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur terus berkomitmen dan berupaya untuk memaksimalkan tiap capaian indikator kinerja dengan harapan melebihi capaian skor kinerja pada tahun-tahun sebelumnya sehingga skor capaian kinerja dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

Capaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur diukur berdasarkan pencapaian atas 13 IKU yang disajikan pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	93,46%	93,46
2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100
3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	85,73%	105
4	Keterlibatan Satker dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	101,24%	101,24
5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100
6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	101,37%	101,37
7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	4,81	4,84	100,62
8	Hasil Evaluasi AKIP	90,05	91,40	101,05
9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	98%	95,62%	97,57
10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	106,88%	105
11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	4,17	105
12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100
13	Tingkat Kinerja Anggaran	84,50%	92,50%	105
<b>Skor Kinerja</b>			<b>101,16</b>	



Adapun perbandingan realisasi Tahun 2024 dengan realisasi tahun sebelumnya selama periode Renstra BPK dan target lima tahun sebagaimana Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Perbandingan Realisasi Tahun Pelaporan dengan Target Lima Tahun

No.	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi					Capaian Tahun 2024 terhadap Target Akhir Renstra (Tahun 2024)
			2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>Strategi 2</b>		<b>Meningkatnya Kualitas Pemeriksaan secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif</b>						
<b>Sasaran</b>		<b>Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi</b>						
1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	93,18%	85,84%	86,67%	79,27%	93,46%	93,46
2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	85,62%	87,21%	87,90%	84,06%	85,73%	105
4	Keterlibatan Satker dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100,55 %	100,28%	101,55 %	101,28 %	101,24%	101,24
5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100

6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100	101%	100,33%	100,52 %	100,28 %	101,37%	101,37
7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (4,81)	4,7	4,5	4,86	4,75	4,84	100,62
8	Hasil Evaluasi AKIP	AA (90,5)	88,56	96,06	93,78	90,5	91,40	101,5
9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	98%	99,25%	99,25%	98,33%	89,48%	95,62%	97,57
10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100%	110%	110%	106,88%	105
11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	3,73	3,81	3,92	4,34	4,17	105
12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
13	Tingkat Kinerja Anggaran	84,50%	90,22%	91,04%	91,08%	89,58%	92,50%	105

Penjelasan atas capaian masing – masing IKU dapat diuraikan sebagai berikut.

#### 1. Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan

Indikator ini mengukur pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan pada tiga tingkatan yaitu internal satuan kerja melalui hasil *Quality Assurance* (QA) dan *Quality Control* (QC) maupun eksternal melalui hasil evaluasi EPP yang bertujuan untuk mendorong kualitas pengendalian mutu pemeriksaan.

Pemenuhan QC Pemeriksaan dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa (PFP) dan QA dalam pemeriksaan dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksa (PSP). Sedangkan untuk hasil evaluasi EPP merupakan evaluasi atas tingkat akurasi

dan konsistensi atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan. LHP sebagai produk utama dari BPK tidak boleh mengandung kesalahan (*zero defect*) agar terhindar dari risiko hukum atas semua tuntutan atau gugatan terhadap LHP BPK.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah dimanfaatkan untuk perbaikan tata kelola keuangan negara.

Pengukuran dalam IKU ini diperoleh dari penjumlahan dua sub-IKU, yaitu:

- a. Hasil QA dan QC satker dengan bobot 40%; dan
- b. Hasil evaluasi EPP dengan bobot 60% (tingkat akurasi (60%) dan tingkat konsistensi (40%)).

Hingga Tahun 2024, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan kegiatan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (DTT) pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Timur. Atas kegiatan pemeriksaan tersebut telah diterbitkan 21 Laporan Hasil Pemeriksaan.

Adapun daftar pemeriksaan dan LHP tahun 2024 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur telah diterbitkan dan disampaikan kepada Ketua DPRD dan Kepala Daerah sebagaimana disajikan pada Tabel 6 berikut.

*Tabel 6. Daftar Pemeriksaan Tahun 2024 pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur*

No	Nama Pemeriksaan	Pelaksanaan Pemeriksaan
1	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda	Semester I Tahun 2024
2	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kota Samarinda di Samarinda	Semester I Tahun 2024
3	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kota Balikpapan di Balikpapan	Semester I Tahun 2024
4	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kota Bontang di Bontang	Semester I Tahun 2024
5	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam	Semester I Tahun 2024
6	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Paser di Tana Paser	Semester I Tahun 2024
7	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong	Semester I Tahun 2024

No	Nama Pemeriksaan	Pelaksanaan Pemeriksaan
8	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur di Sangatta	Semester I Tahun 2024
9	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat di Sendawar	Semester I Tahun 2024
10	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Berau di Tanjung Redeb	Semester I Tahun 2024
11	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu di Ujoh Bilang	Semester I Tahun 2024
12	Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Rangka Mendukung Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023 s.d. Semester I 2024 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Instansi Terkait Lainnya di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur.	Semester II Tahun 2024
13	Pemeriksaan Kinerja atas Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun Anggaran 2023 dan 2024 pada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan Instansi Terkait Lainnya di Sendawar.	Semester II Tahun 2024
14	Pemeriksaan Kinerja atas Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun Anggaran 2023 dan 2024 pada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan Instansi Terkait Lainnya di Sangatta.	Semester II Tahun 2024
15	Pemeriksaan Kinerja atas Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun Anggaran 2023 dan 2024 pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Instansi Terkait Lainnya di Penajam.	Semester II Tahun 2024
16	Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT) Tahun 2023 s.d. Triwulan III Tahun 2024 pada Pemerintah Kota Samarinda di Samarinda.	Semester II Tahun 2024
17	Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Keuangan Pemilihan Umum 2024 Periode Tahun 2023 s.d. Semester I Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur.	Semester II Tahun 2024
18	Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada Pemerintah Kabupaten Paser dan Instansi Terkait Lainnya di Tana Paser.	Semester II Tahun 2024

No	Nama Pemeriksaan	Pelaksanaan Pemeriksaan
19	Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada Pemerintah Kabupaten Berau dan Instansi Terkait Lainnya di Tanjung Redeb.	Semester II Tahun 2024
20	Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada Pemerintah Kota Balikpapan dan Instansi Terkait Lainnya di Balikpapan.	Semester II Tahun 2024
21	Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Instansi Terkait Lainnya di Tenggarong.	Semester II Tahun 2024

Adapun target, realisasi, dan capaian IKU Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan pada periode Renstra Tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel 7 berikut.

*Tabel 7. Target, Realisasi, dan Capaian IKU 1 pada Periode Renstra Tahun 2020-2024*

IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi *)	93,18%	85,84%	86,67%	79,27%	93,46%
Capaian	93,18	85,84	86,67	79,27	93,46
Persentase Realisasi Tahun 2024 terhadap Target Tahun 2024	93,46%				

Realisasi IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 adalah sebesar 93,46% dari target sebesar 100% sehingga capaiannya sebesar 93,46. Realisasi sebesar 93,46% tersebut diperoleh dari 100% hasil QA dan QC serta 89,09% hasil Evaluasi EPP. Jika dibandingkan dengan realisasi selama periode Renstra Tahun 2020-2024, realisasi IKU 1 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2024 merupakan realisasi dengan nilai tertinggi.

Realisasi IKU 1 Tahun 2024 ini lebih rendah dibandingkan target yang ditetapkan. Ketidaktercapaian IKU 1 tersebut disebabkan oleh masih adanya temuan konsistensi atas LHP yang diterbitkan. Namun demikian, realisasi IKU 1 pada Tahun 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi IKU tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan dan peningkatan dalam pemenuhan QA yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksa (PSP) dan QC yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa (PSP) demi terciptanya penerbitan LHP yang berkualitas.

Walaupun belum mencapai target yang ditetapkan tahun 2024, upaya yang telah dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dalam pencapaian target IKU selama tahun 2024 yaitu:

- a. Melaksanakan kegiatan pemeriksaan sesuai dengan SPKN, Kode Etik, dan PMP melalui pemenuhan *Quality Control* (QC) dan *Quality Assurance* (QA) yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP);
- b. Melakukan *cross review* dan pengecekan berulang atas penyusunan LHP guna meningkatkan akurasi dan konsistensi;
- c. Membuat panduan *check list* penjaminan mutu pelaporan hasil pemeriksaan untuk mereviu konsep dan temuan LHP yang dibuat secara berjenjang mulai dari anggota tim, ketua tim, hingga pengendali teknis; dan
- d. Memanfaatkan aplikasi CAKEP (Cari Kata Pemeriksaan, Kesekretariatan, dan Pelayanan) sebagai upaya *quality control* penulisan dalam laporan hasil pemeriksaan.



Gambar 4. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kinerja dan Kepatuhan Semester II Tahun 2024

Untuk meningkatkan dan mendorong pemenuhan capaian IKU ini, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur akan terus berupaya untuk:

- a. Berperan aktif dalam QA dan QC pemeriksaan untuk mendorong pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan dari Pengendali Teknis, Wakil Penanggung Jawab, dan Penanggung Jawab melalui penyusunan laporan mingguan, diskusi mingguan, dan supervisi pemeriksaan guna menjaga dan meningkatkan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dihasilkan oleh BPK RI;



- b. Tetap melakukan *cross review* dan pengecekan berulang untuk memastikan akurasi dan konsistensi sebelum LHP diterbitkan;
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan panduan *check list* penjaminan mutu pelaporan hasil pemeriksaan guna meningkatkan ketelitian dan kecermatan dalam proses *review* hasil pemeriksaan;
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi CAKEP (Cari Kata Pemeriksaan, Kesekretariatan, dan Pelayanan) sebagai alat kontrol terjadinya kesalahan penulisan; dan
- e. Memanfaatkan Buku Pintar Pemeriksaan LKPD dengan harapan dapat menjadi pelengkap perangkat lunak pemeriksaan LKPD yang selama ini telah tersedia yang meliputi Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan, Kebijakan Pemeriksaan LKPD, Panduan Pemeriksaan LKPD, dan *Frequently Asked Question* (FAQ) sehingga hasil pemeriksaan LKPD di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dapat menghasilkan LHP yang konsisten, akurat, dan berkualitas.

Realisasi IKU Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan Tahun 2024 sebesar 93,46% yang telah meningkat dari tahun sebelumnya ini akan menjadi *baseline* dalam pengukuran kinerja organisasi pada pelaksanaan Renstra di periode mendatang.

## 2. Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan

Indikator ini menunjukkan hasil evaluasi atas kesesuaian Simpulan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (DTT) yang diterbitkan oleh satuan kerja pemeriksaan dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan (P2) Kinerja dan DTT dengan tujuan untuk mendorong satuan kerja (satker) pemeriksaan agar meningkatkan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).



Gambar 5. Kegiatan Cek Fisik Pemeriksaan Kinerja atas Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun Anggaran 2023 dan 2024 pada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan Instansi Terkait Lainnya di Sendawar.

Pengukuran IKU ini diperoleh dari pembagian jumlah LHP yang simpulannya sesuai dengan harapan penugasan dengan jumlah LHP yang diterbitkan berdasarkan dokumen Laporan Evaluasi EPP. Adapun target, realisasi, dan capaian IKU Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan pada Periode Renstra Tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel 8 berikut.

*Tabel 8. Target, Realisasi, dan Capaian IKU 2 pada Periode Renstra Tahun 2020-2024*

IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi *)	100%	100%	100%	100%	100%
Capaian	100	100	100	100	100
Persentase Realisasi Tahun 2024 terhadap Target Tahun 2024	100%				

Realisasi IKU Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan pada Tahun 2024 adalah sebesar 100% dari target sebesar 100% sehingga capaiannya sebesar 100. Realisasi sebesar 100% tersebut diperoleh dari 5 LHP Kinerja dan 5 LHP DTT yang simpulannya sesuai dengan harapan penugasan dibandingkan dengan 10 LHP Kinerja dan DTT yang telah diterbitkan. Hal ini mengindikasikan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur telah mampu memenuhi tujuan hasil pemeriksaan yang memenuhi harapan penugasan yang berdampak pada tercapainya tujuan dalam peningkatan kualitas LHP.

Adapun rincian LHP Kinerja dan DTT yang telah diterbitkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Rangka Mendukung Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023 s.d. Semester I 2024 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Instansi Terkait Lainnya di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur;
- b. Pemeriksaan Kinerja atas Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun Anggaran 2023 dan 2024 pada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan Instansi Terkait Lainnya di Sendawar;
- c. Pemeriksaan Kinerja atas Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun Anggaran 2023 dan 2024 pada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan Instansi Terkait Lainnya di Sangatta;
- d. Pemeriksaan Kinerja atas Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun Anggaran 2023 dan 2024 pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Instansi Terkait Lainnya di Penajam;



- e. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT) Tahun 2023 s.d. Triwulan III Tahun 2024 pada Pemerintah Kota Samarinda di Samarinda;
- f. Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Keuangan Pemilihan Umum 2024 Periode Tahun 2023 s.d. Semester I Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur;
- g. Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada Pemerintah Kabupaten Paser dan Instansi Terkait Lainnya di Tana Paser;
- h. Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada Pemerintah Kabupaten Berau dan Instansi Terkait Lainnya di Tanjung Redeb;
- i. Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada Pemerintah Kota Balikpapan dan Instansi Terkait Lainnya di Balikpapan; dan
- j. Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Instansi Terkait Lainnya di Tenggarong.

Realisasi IKU ini pada Tahun 2024 tercapai sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 100% yang mana sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Selama periode Renstra Tahun 2020-2024, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur berhasil mempertahankan capaian IKU ini dengan realisasi 100%.

Upaya yang dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur untuk mencapai target IKU selama Tahun 2024 tak lepas dari kerja sama dan komitmen dari para pejabat fungsional pemeriksa dan pejabat struktural dalam menyusun program/prosedur pemeriksaan dan pelaksanaan pemeriksaan sehingga pada Laporan Evaluasi EPP dinyatakan bahwa simpulan dalam LHP Kinerja dan DTT yang diterbitkan sesuai dengan harapan penugasan. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur juga telah berupaya untuk menyusun kesimpulan pemeriksaan sesuai dengan tujuan dan harapan penugasan.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian atas IKU ini, BPK Perwakilan Provinsi akan berupaya:

- a. Merencanakan dan melaksanakan prosedur pemeriksaan sesuai dengan tujuan pemeriksaan sehingga diharapkan hasil pemeriksaan yang dihasilkan memenuhi harapan penugasan; dan
- b. Menyusun program pemeriksaan sesuai dengan sistem perencanaan dan penganggaran agar tetap memberikan kesesuaian terhadap harapan penugasan atas laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan.
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan Aplikasi Sistem Gabungan Pemeriksaan (SIGAP) sebagai inovasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur. Dengan adanya Aplikasi SIGAP, kegiatan perencanaan-pelaksanaan-pelaporan pemeriksaan diharapkan dapat menghasilkan kinerja pemeriksaan yang baik sehingga pemeriksaan mampu memenuhi harapan penugasan.

Realisasi IKU Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan Tahun 2024 sebesar 100% yang telah mencapai target ini akan menjadi *baseline* dalam pengukuran kinerja organisasi pada pelaksanaan Renstra di periode mendatang.

### 3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Indikator ini menunjukkan tingkat kepatuhan Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diharapkan berdampak pada perbaikan tata kelola keuangan negara/daerah. Rekomendasi yang diukur adalah rekomendasi yang telah disampaikan kepada *auditee* sejak Tahun 2005. Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan *auditee* atas rekomendasi BPK melalui penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Pengukuran IKU ini diperoleh dari penjumlahan jumlah rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti dan jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah dibandingkan dengan jumlah rekomendasi yang telah disampaikan ke *auditee* yang datanya bersumber dari data olahan dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) terbaru pada tahun berjalan yang diterbitkan oleh Direktorat EPP.

Adapun target, realisasi, dan capaian IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada periode Renstra Tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel 9 berikut.

Tabel 9. Target, Realisasi, dan capaian IKU 3 pada Periode Renstra Tahun 2020-2024

IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	75%	75%	75%	75%	75%
Realisasi *)	85,62%	87,21%	87,90%	84,06%	85,73%
Capaian	105	105	105	105	105
Persentase Realisasi Tahun 2024 terhadap Target Tahun 2024	85,73%				

Realisasi IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Tahun 2024 adalah sebesar 85,73% dari target sebesar 75% sehingga capaiannya sebesar 105. Realisasi sebesar 85,73% tersebut diperoleh dari 10.595 jumlah rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti ditambah dengan 120 jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah dibandingkan dengan total jumlah rekomendasi yang telah disampaikan ke *auditee* sebesar 12.499 rekomendasi. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat penerimaan *auditee* atas rekomendasi BPK sebesar 85,73% melebihi target yang ditetapkan BPK sebesar 75%.

Realisasi IKU ini pada Tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Upaya yang telah dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan

Timur dalam pencapaian target IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan selama Tahun 2024 yaitu:

- a. Konsistensi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan kegiatan verifikasi dan validasi dokumen tindak lanjut melalui aplikasi SIPTL;
- b. Melaksanakan pembahasan status I dan IV atas Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (PTLRHP);
- c. Melakukan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut melalui aplikasi SMP dan SIPTL;
- d. Berperan aktif dalam mendorong pemerintah daerah untuk terus meningkatkan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan melalui penyelenggaraan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Semester I Tahun 2024 pada tanggal 24 s.d. 28 Juni 2024 dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Semester II Tahun 2024 pada tanggal 16 s.d. 20 Desember 2024; dan
- e. Memberikan penghargaan kepada entitas pemerintah daerah yang memperoleh peringkat tertinggi atas penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan progres tertinggi atas penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sebagai upaya meningkatkan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah disampaikan ke pemerintah daerah/*auditee*.



*Gambar 6. Pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Semester II Tahun 2024*

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian atas IKU ini, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur akan terus berupaya untuk:

- a. Mendorong penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) melalui percepatan verifikasi dan validasi dokumen TLRHP pada Aplikasi SiPTL yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam memantau TLRHP;
- b. Pengusulan penetapan status I dan IV ke Anggota VI melalui Tortama KN VI;
- c. Peningkatan koordinasi dan konsultasi tim pemegang dosir TLRHP setiap entitas Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Timur dengan pemerintah daerah melalui penyelenggaraan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK; dan
- d. Pemberian konsultasi atas permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah terkait tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.

Sehubungan dengan rutinitas pelaksanaan pemantauan TLRHP, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur menyusun Kamus Pintar Usulan Status TLRHP. Kamus Pintar Usulan Status TLRHP merupakan pelengkap Buku Saku Pemantauan TLRHP sehingga harapannya dapat dijadikan pedoman oleh pemeriksa dan entitas dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sehingga dapat memberikan arah yang jelas, akurat, dan konsisten bagi pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur serta pemerintah daerah dalam menentukan status penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan.

Realisasi IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Tahun 2024 sebesar 85,73% yang telah mencapai target ini akan menjadi *baseline* dalam pengukuran kinerja organisasi pada pelaksanaan Renstra di periode mendatang.

#### 4. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/lokal/signifikan lainnya berdasarkan isu strategis, RPJMN dan SDG's yang bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional berdasarkan isu strategis RPJMN dan SDG's.

Pengukuran IKU ini diperoleh dari persentase realisasi pemeriksaan tematik nasional/signifikan lainnya terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional/signifikan lainnya disertai alokasi penambahan skor yang dihitung dengan memperhatikan jumlah dan jenjang peran pemeriksa yang dikontribusikan oleh tiap-tiap satuan kerja pada setiap pemeriksaan tematik nasional/lokal/signifikan lainnya. Adapun target, realisasi, dan capaian IKU Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional pada Periode Renstra Tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel 10 berikut.



Tabel 10. Target, Realisasi, dan Capaian IKU 4 pada Periode Renstra Tahun 2020-2024

IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi *)	100,55%	100,28%	101,55%	101,28%	101,24%
Capaian	100,55	100,28	101,55	101,28	101,24
Persentase Realisasi Tahun 2024 terhadap Target Tahun 2024	101,24%				

Realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional Tahun 2024 adalah sebesar 101,24% dari target sebesar 100% sehingga capaiannya sebesar 101,24. Realisasi sebesar 101,24% tersebut diperoleh dari realisasi 2 (dua) pemeriksaan tematik nasional dari 2 (dua) rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2024 telah turut serta dalam pemeriksaan yang mendukung pelaksanaan akuntabilitas program prioritas nasional.

Adapun 2 (dua) pemeriksaan tematik nasional yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2024 yaitu:

- a. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT) Tahun 2023 s.d. Triwulan III Tahun 2024 pada Pemerintah Kota Samarinda di Samarinda; dan
- b. Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Keuangan Pemilihan Umum 2024 Periode Tahun 2023 s.d. Semester I Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur.



Gambar 7. Cek Fisik Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT) Tahun 2023 s.d. Triwulan III Tahun 2024 pada Pemerintah Kota Samarinda di Samarinda

Realisasi IKU ini pada 2024 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut dikarenakan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2024 hanya terlibat dalam 2 (dua) pemeriksaan tematik nasional. Dalam menetapkan pemeriksaan yang akan dilakukan, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan analisis atas beberapa tema pemeriksaan tematik nasional namun pemeriksaan kinerja dan/atau DTT yang ditetapkan dan dilaksanakan lebih berfokus pada tema pemeriksaan tematik lokal terkait kinerja Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan pemeriksaan kepatuhan belanja daerah. Perencanaan dan Pelaksanaan pemeriksaan tersebut berdasarkan pada pertimbangan dan penyesuaian dengan isu-isu yang terjadi di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Meskipun realisasi IKU ini lebih rendah dari tahun sebelumnya, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur telah berhasil memperoleh capaian IKU melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun 2024. Keikutsertaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dalam pemeriksaan tematik nasional tersebut menunjukkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur telah berupaya untuk tetap berkontribusi dalam pemeriksaan guna mendukung pelaksanaan akuntabilitas program prioritas nasional khususnya PN 6 dan PN 7.

Upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian target IKU ini selama Tahun 2024 adalah BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur telah menyusun RKP dan alokasi anggaran serta melaksanakan kegiatan pemeriksaan atas tematik nasional berdasarkan isu strategis, RPJMN, dan SDG's. Selain itu, ketercapaian tersebut juga didukung oleh kontribusi pemeriksa dari tiap jenjang peran pemeriksa untuk mengoptimalisasikan perencanaan dan penyelenggaraan pemeriksaan tematik nasional pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian atas IKU ini, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur akan terus berupaya memprioritaskan perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan berdasarkan isu strategis, RPJMN dan SDG's dengan memaksimalkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran sehingga dapat meningkatkan pemanfaatan rekomendasi capaian atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah untuk mendukung tercapainya target RJP MN dan SDG's. Untuk terus mendorong ketercapaian IKU ini, setiap pemeriksa pada setiap jenjang harus saling aktif berkontribusi untuk mengoptimalisasikan penyelenggaraan perencanaan pemeriksaan tematik nasional pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.

Realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional Tahun 2024 sebesar 101,24% yang telah mencapai target ini akan menjadi *baseline* dalam pengukuran kinerja organisasi pada pelaksanaan Renstra di periode mendatang.

#### 5. Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan

Indikator ini menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan seperti Lembaga Perwakilan dan Institusi Penegak Hukum (IPH) atau pemangku kepentingan lainnya. Pemenuhan pemeriksaan



ini menunjukkan tingkat responsif BPK dalam memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan. Pemenuhan pemeriksaan dari pemangku kepentingan ini dikoordinir oleh AUI dan Pusat Kemitraan Global. Satuan kerja pemeriksaan lainnya dapat berkontribusi dalam pemeriksaan tersebut melalui kontribusi tenaga pemeriksa.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan yang ditindaklanjuti BPK. Pengukuran IKU ini diperoleh dari penjumlahan dari dua sub-IKU yaitu:

- a. jumlah pemeriksaan dari pemangku kepentingan yang disetujui dan dipenuhi oleh BPK yang melibatkan pemeriksa di Satuan Kerja Pemeriksaan terkait; dan
- b. alokasi penambahan skor yang dihitung oleh Direktorat PSMK dengan melibatkan jumlah dan jenjang peran pemeriksa yang dikontribusikan oleh masing-masing satker pada setiap pemeriksaan pemenuhan permintaan dari pemangku kepentingan.

Adapun target, realisasi, dan capaian IKU Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan pada periode Renstra Tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel 11 berikut.

*Tabel 11. Target, Realisasi, dan Capaian IKU 5 pada Periode Renstra Tahun 2020-2024*

IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi *)	100%	100%	100%	100%	100%
Capaian	100	100	100	100	100
Persentase Realisasi Tahun 2024 terhadap Target Tahun 2024	100%				

Realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 adalah sebesar 100% dari target sebesar 100% sehingga capaiannya sebesar 100. Selama Tahun 2024, belum terdapat pemenuhan pemeriksaan dari pemangku kepentingan yang dikoordinir oleh AUI dan Pusat Kemitraan Global dengan menggunakan tenaga pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.

Realisasi IKU ini pada Tahun 2024 tercapai sama dengan tahun sebelumnya yaitu 100%. Selama periode Renstra Tahun 2020-2024 realisasi IKU ini tetap terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 100%.

Pada Tahun 2024, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur telah berupaya untuk tetap membuka layanan dan akses kepada para pemangku kepentingan terkait permintaan pemeriksaan melalui pemberian surat permintaan pemeriksaan ke BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur juga menerima layanan publik secara *online/offline* berkaitan dengan pengajuan permohonan informasi dan komunikasi, serta penyampaian

pengaduan masyarakat sebagai wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang dapat diakses melalui website BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur pada tautan <https://kaltim.bpk.go.id> dan/atau berkunjung ke Ruang Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) bertempat di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Jalan Muhammad Yamin No. 19 Kota Samarinda. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur juga terus berupaya untuk dapat memberikan pelayanan terbaik dan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat yang masuk.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian IKU ini, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur akan berkomitmen untuk ikut berkontribusi dalam pemenuhan pemeriksaan dari pemangku kepentingan yang dikoordinir oleh Auditorat Utama Investigasi (AUI) dan Pusat Kemitraan Global.



Gambar 8. Ruang PIK

Realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024 sebesar 100% yang telah mencapai target ini akan menjadi *baseline* dalam pengukuran kinerja organisasi pada pelaksanaan Renstra di periode mendatang.

#### 6. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMD dan SDG's. Pemeriksaan tematik lokal adalah pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan strategi pemeriksaan BPK atas isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah atau menjadi tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD.

Pemeriksaan ini dilakukan oleh BPK Perwakilan minimal satu kali dalam periode Renstra dan dilakukan pada beberapa entitas dalam satu tahun berjalan. Tujuan dari

pengukuran indikator ini adalah untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan atas tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMD, dan SDG's.

Pengukuran IKU ini diperoleh dari persentase realisasi pemeriksaan tematik lokal terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik lokal disertai alokasi penambahan skor yang dihitung dengan memperhatikan jumlah dan jenjang peran pemeriksa yang dikontribusikan oleh tiap-tiap satuan kerja pada setiap pemeriksaan tematik lokal. Adapun target, realisasi, dan capaian IKU Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal pada periode Renstra Tahun 2020-2024 pada Tabel 12 berikut.

*Tabel 12. Target, Realisasi, dan Capaian IKU 6 pada Periode Renstra Tahun 2020-2024*

IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi *)	101%	100,33%	100,52%	100,28%	101,37%
Capaian	101	100,33	100,52	100,28	101,37
Persentase Realisasi Tahun 2024 terhadap Target Tahun 2024	101,37%				

Realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal Tahun 2024 adalah sebesar 101,37% dari target sebesar 100% sehingga capaiannya sebesar 101,37. Realisasi sebesar 100% tersebut diperoleh dari realisasi 4 (empat) pemeriksaan tematik lokal dari 4 (empat) rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik lokal. Hal ini mengindikasikan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2024 telah turut serta dalam pemeriksaan yang mendukung pelaksanaan akuntabilitas program prioritas daerah.

Adapun 4 (empat) pemeriksaan tematik lokal yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2024 yaitu:

- a. Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Rangka Mendukung Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023 s.d. Semester I 2024 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Instansi Terkait Lainnya di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur;
- b. Pemeriksaan Kinerja atas Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun Anggaran 2023 dan 2024 pada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan Instansi Terkait Lainnya di Sendawar;
- c. Pemeriksaan Kinerja atas Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun Anggaran 2023 dan 2024 pada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan Instansi Terkait Lainnya di Sangatta; dan

- d. Pemeriksaan Kinerja atas Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun Anggaran 2023 dan 2024 pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Instansi Terkait Lainnya di Penajam.

Realisasi IKU ini pada Tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya dan telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 101,37%. Upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian target IKU ini selama Tahun 2024 adalah BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur telah menyusun RKP dan alokasi anggaran serta melaksanakan kegiatan pemeriksaan atas tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMD, dan SDG's. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur juga telah berupaya menganalisis dan memperhatikan isu-isu yang terjadi di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dalam penentuan pemeriksaan tematik lokal yang dilaksanakan sehingga dapat mendorong percepatan pembangunan daerah.



*Gambar 9. Pemeriksaan Kinerja atas Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun Anggaran 2023 dan 2024 pada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan Instansi Terkait Lainnya di Sangatta*

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian atas IKU ini, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur akan terus berupaya memprioritaskan perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan berdasarkan isu strategis, RPJMD dan SDG's dengan memaksimalkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran sehingga dapat melaksanakan pemeriksaan tematik lokal yang menjangkau lebih banyak entitas yang diperiksa dalam upaya memberikan peningkatan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah untuk mendukung tercapainya target RJPMD dan SDG's.

Realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal Tahun 2024 sebesar 101,37% yang telah mencapai target ini akan menjadi *baseline* dalam pengukuran kinerja organisasi pada pelaksanaan Renstra di periode mendatang.

## 7. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

Indikator ini mengukur tingkat pemahaman nilai-nilai dasar (Integritas, Independensi, dan Profesionalisme) oleh seluruh pegawai BPK yang dilakukan melalui survei. Indikator ini merupakan dasar bagi pengembangan budaya organisasi BPK. Tujuan dari pengukuran IKU ini adalah untuk mengukur sejauh mana pegawai BPK dalam memahami nilai dasar BPK. Adapun skala hasil survei sebagai berikut.

- 1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan
- 2,00 - 2,99 = tidak memuaskan
- 3,00 – 3,99 = memuaskan
- 4,00 – 5,00 = sangat memuaskan

Adapun target, realisasi, dan capaian IKU Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK pada periode Renstra Tahun 2020-2024 sebagaimana pada Tabel 13 berikut.

Tabel 13. Target, Realisasi, dan Capaian IKU 7 pada Periode Renstra Tahun 2020-2024

IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangat Memuaskan (4,81)
Realisasi *)	4,70	4,50	4,86	4,75	4,84
Capaian	94	90	97,2	95	100,62
Persentase Realisasi Tahun 2024 terhadap Target Tahun 2024	4,84				

Realisasi IKU Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK Tahun 2024 adalah sebesar 4,84 (sangat memuaskan) dari target sebesar 4,81 sehingga capaiannya sebesar 100,62. Capaian skor IKU ini pada Tahun 2024 lebih tinggi dibanding dengan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman nilai - nilai dasar dari pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur telah sangat memuaskan dan berhasil meningkat melebihi target yang telah ditentukan di awal tahun. Proses internalisasi kepada pegawai atas pemahaman nilai - nilai dasar (Integritas, Independensi, dan Profesionalisme) telah lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Upaya - upaya yang telah dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur untuk mencapai target dari IKU Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK ini melalui para pimpinan dan pejabat struktural terus berupaya memberikan arahan, motivasi, dan teladan yang baik dalam rangka mendorong implementasi nilai dasar BPK, proses internalisasi kepada pegawai terkait visi, misi, dan kepatuhan kode etik pada lingkup tugas pokok dan fungsi BPK baik di lingkungan kantor maupun kehidupan personal pada setiap kegiatan yang dilangsungkan. Selain itu, telah dilakukan monitoring data pegawai pemeriksa yang memiliki hubungan kepentingan dengan entitas pemeriksaan, telah dilakukan monitoring penugasan pemeriksaan pada setiap



pemeriksa tidak lebih dari tiga kali berturut - turut di entitas yang sama sebagai bahan pertimbangan penugasan pemeriksaan LKPD, dan telah dilakukan pengarahan Kepala Perwakilan terkait Nilai Dasar BPK, Internalisasi Budaya Kerja Anti Korupsi, serta telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai terkait visi, misi, dan budaya kerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian atas IKU Indeks Implementasi Nilai Dasar, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen untuk terus berupaya melakukan evaluasi dan mendorong para pegawai untuk meningkatkan implementasi Nilai Dasar BPK dengan melakukan sosialisasi yang lebih intensif, mengadakan *coaching* dan *mentoring* kepada pegawai agar nilai dasar BPK bisa lebih dipahami dan dimaknai, serta mengintegrasikannya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pegawai sehari-hari.



Gambar 10. Kegiatan Pengarahan Kepala Perwakilan dalam rangka Pemeriksaan Pendahuluan Tematik Kinerja dan DTT Semester II Tahun 2024

Realisasi IKU Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK Tahun 2024 sebesar 4,84 yang telah melebihi target yang ditentukan ini akan menjadi *baseline* dalam pengukuran kinerja organisasi pada pelaksanaan Renstra di periode mendatang.

#### 8. Hasil Evaluasi AKIP

Evaluasi AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah (Permen PAN RB 88/2021 Pasal 1 (2)). Evaluasi tersebut dilaksanakan dalam dua tahap yaitu *Self-assessment* oleh satuan kerja Eselon I dan Eselon II di lingkungan BPK dan Evaluasi AKIP oleh Itama atas satuan kerja Eselon I dan/atau Eselon II (*sampling*). Predikat penilaian Hasil Evaluasi AKIP adalah sebagai berikut:

- a. AA = Sangat Memuaskan (>90-100)
- b. A = Memuaskan (>80-90)
- c. BB = Sangat Baik (>70-80)



- d. B = Baik (>60-70)
- e. CC = Cukup (>50-60)
- f. C = Kurang (>30-50)
- g. D = Sangat Kurang (>0-30)

Indikator ini bertujuan untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja satuan kerja di BPK. Adapun target, realisasi, dan capaian IKU Hasil Evaluasi AKIP pada periode Renstra Tahun 2020-2024 sebagaimana pada Tabel 14 berikut.

Tabel 14. Target, Realisasi, dan Capaian IKU 8 pada Periode Renstra Tahun 2020-2024

IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	AA (90,05)
Realisasi *)	A (88,56)	AA (96,00)	AA (93,78)	AA (90,5)	AA (91,40)
Capaian	102,98	105	105	101,69	101,5
Persentase Realisasi Tahun 2024 terhadap Target Tahun 2024	AA (91,40)				

Realisasi IKU Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 adalah sebesar 91,40 dari target sebesar 90,05 sehingga capaiannya sebesar 101,5 yang diperoleh dari Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini menunjukkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur mendorong pelaksanaan tata kelola reformasi birokrasi sehingga dapat mewujudkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dengan kategori sangat memuaskan.

Realisasi IKU atas Implementasi AKIP Tahun 2024 lebih tinggi dibanding dengan tahun sebelumnya. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja melalui penyusunan rencana aksi pencapaian kinerja, pelaksanaan rapat pelaksanaan kegiatan anggaran dan kinerja, penyusunan laporan pemantauan kinerja, dan penggunaan aplikasi dalam memantau kinerja harian pegawai. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan evaluasi mandiri AKIP Tahun 2024 dan telah dilakukan evaluasi atas hasil penilaian mandiri bersama dengan Itama, telah menindaklanjuti rekomendasi - rekomendasi atas evaluasi AKIP Tahun sebelumnya, menerapkan *reward and punishment* berupa pemberian penghargaan pegawai teladan sebagai bentuk apresiasi bagi pegawai yang berintegritas dan berprestasi, dan memberikan penilaian kinerja sesuai dengan kinerja pegawai yang sebenarnya.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya untuk melakukan perbaikan akuntabilitas kinerja dan menjadikan pengukuran kinerja sebagai dasar penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien serta menjadikan laporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, menginformasikan keberhasilan/kegagalan serta memberitahukan upaya perbaikan

dan penyempurnaan, sehingga dapat meningkatkan hasil kinerja dan capaian evaluasi AKIP hingga akhir periode renstra atau tahun 2024 ini.



Gambar 11. Rapat Evaluasi Kegiatan

Realisasi IKU Evaluasi AKIP Tahun 2024 dengan kategori sangat memuaskan (AA)/91,40 yang telah melebihi target yang ditentukan ini akan menjadi *baseline* dalam pengukuran kinerja organisasi pada pelaksanaan Renstra di periode mendatang.

#### 9. Tingkat Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

BPK melalui Biro TI telah menyediakan layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi seluruh pegawai yang meliputi layanan aplikasi umum berupa Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SISDM), Jaringan Surat Menyurat Kedinasan (JASMIN), dan layanan aplikasi pemeriksaan berupa Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP), Sistem Aplikasi Pemeriksaan (SiAP), serta Sistem Pemantauan Tindak Lanjut (SiPTL) dengan tujuan untuk mendorong satuan kerja agar memanfaatkan layanan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

- a. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SISDM diukur dengan memperhatikan pemutakhiran data masing – masing pegawai pada menu LHKPN, tempat tinggal/domisili, pendidikan dinas, SPT, informasi pegawai, serta seminar/*workshop*/sosialisasi/sejenis.
- b. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi JASMIN diukur dengan memperhatikan log akses aplikasi JASMIN dan tindak lanjut atas surat masuk untuk Pejabat Struktural sampai level Pejabat Struktural terakhir dalam satu Unit/Satuan Kerja.
- c. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SMP diukur dengan memperhatikan penginputan data pemeriksaan ke aplikasi SMP dalam satu Unit/Satuan Kerja Pemeriksaan.

- d. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SiAP diukur dengan memperhatikan pemanfaatan SIAP dalam pemeriksaan Laporan Keuangan (LK), Kinerja, dan Dengan Tujuan Tertentu (DTT) serta pemanfaatan modul pelaporan SIAP dalam penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan.
- e. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SiPTL diukur dengan memperhatikan status Bahan Tindak Lanjut (TL) yang dikirimkan oleh entitas kepada Unit/Satuan Kerja.

Pengukuran IKU ini diperoleh dari penjumlahan persentase tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SISDM, aplikasi JASMIN, aplikasi SMP, aplikasi SiAP, dan Aplikasi SiPTL. Adapun perbandingan target, realisasi, dan capaian IKU Pemanfaatan TI pada periode Renstra Tahun 2020-2024 sebagaimana pada Tabel 15 berikut.

Tabel 15. Target, Realisasi, dan Capaian IKU 9 pada Periode Renstra Tahun 2020-2024

IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	95%	96%	97%	98%	98%
Realisasi *)	99,25%	99,25%	98,33%	89,48%	95,62%
Capaian	104,48	103,39	101,37	91,31	97,57
Persentase Realisasi Tahun 2024 terhadap Target Tahun 2024	95,62%				

Realisasi IKU Tingkat Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2024 adalah sebesar 95,62% dari target sebesar 98% sehingga capaiannya sebesar 97,57. Realisasi sebesar 95,62% tersebut diperoleh dari 100,00% pemanfaatan layanan aplikasi SISDM, 99,97% pemanfaatan layanan aplikasi JASMIN, 100,00% pemanfaatan aplikasi SMP, 78,45% pemanfaatan aplikasi SiAP, dan 99,75% pemanfaatan layanan aplikasi SiPTL. Hal ini menunjukkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur masih belum optimal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan memanfaatkan layanan TIK yang disediakan oleh Biro TI karena masih belum dapat mencapai target yang ditentukan.

Realisasi IKU ini pada Tahun 2024 telah lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya meskipun masih belum dapat mencapai target yang ditentukan. Namun BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur telah berupaya melakukan pendampingan dan sosialisasi atas penggunaan aplikasi-aplikasi yang menjadi penilaian dalam IKU Pemanfaatan TI dan selalu mendorong setiap pegawai untuk memanfaatkan aplikasi yang menjadi penilaian dalam IKU.

Upaya - upaya yang telah dilakukan selama Tahun 2024 dalam meningkatkan IKU Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi ini yaitu dari sub-IKU penilaian SISDM, BPK Perwakilan Kalimantan Timur telah melaksanakan Pemutakhiran data pegawai pada aplikasi SISDM, seperti foto pegawai, monitoring riwayat LHKPN, riwayat tempat tinggal/domisili, riwayat pendidikan dinas, riwayat SPT, riwayat seminar/*workshop*, dan riwayat informasi pegawai. Sedangkan dari sub-IKU penilaian JASMIN, pejabat struktural selalu melakukan *monitoring* terkait status

tindak lanjut atas surat masuk yang ada. Untuk aplikasi pemeriksaan, pejabat struktural hingga ketua tim turut memonitor pengisian dokumen setiap tahapan pemeriksaan pada aplikasi SiAP, SMP, dan SIPTL.

Ketidaktercapainya IKU ini disebabkan oleh kurang maksimalnya pegawai dalam melakukan pemanfaatan aplikasi teknologi informasi yang disediakan oleh BPK, khususnya pada aplikasi SiAP dan terdapat obyek pemeriksaan (obrik) yang direncanakan pada RKP yang tidak terealisasi selama Tahun 2024, sehingga mempengaruhi capaian nilai pada aplikasi SiAP.

Dalam upaya meningkatkan capaian IKU, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur akan memaksimalkan pemanfaatan TIK melalui pendampingan/sosialisasi penggunaan TIK, melakukan pendampingan dan *monitoring* atas percepatan pemutakhiran data pegawai pada aplikasi SISDM serta pemaksimalan penggunaan aplikasi pemeriksaan baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pemantauan tindak lanjut pemeriksaan, membuka layanan tanya jawab serta bantuan konsultasi tingkat pemanfaatan TI. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur terus mendorong para pemeriksa untuk dapat mengoptimalkan penggunaan aplikasi SMP melalui penginputan data pemeriksaan seperti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), temuan, rekomendasi, serta mendorong para pemeriksa dalam pengoptimalan aplikasi SIAP untuk pengisian data pemeriksaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan atas pemeriksaan interim/pendahuluan dan pemeriksaan terinci, baik pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksaan kinerja, maupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Realisasi IKU Pemanfaatan TI Tahun 2024 sebesar 95,62% yang masih belum mencapai target yang ditentukan ini akan menjadi *baseline* dalam pengukuran kinerja organisasi pada pelaksanaan Renstra di periode mendatang.

#### 10. Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan

Manajemen pengetahuan dipandang sebagai upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan pengetahuan secara efektif dalam suatu organisasi. Pengukuran IKU ini dinilai dari penjumlahan persentase tingkat penyusunan *Innovative Practice* dan tingkat pelaksanaan Aktivitas Manajemen Pengetahuan (MP) pada tiap satuan kerja.

*Innovative Practice* menekankan pada inovasi/kebaruan atas praktik terbaik (*Best Practice*) yang ada dan dapat direalisasikan melalui:

- a. Proses identifikasi pengetahuan yang mencakup praktik terbaik (*Best Practice*). *Best Practice* (BP) adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang;
- b. Penerapan BP merupakan implementasi atas BP yang telah melewati proses validasi dan ditetapkan untuk diimplementasi oleh Unit/Satuan Kerja selain pengusul BP.

Sedangkan Aktivitas MP merupakan metode yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan penyebaran informasi/pengetahuan. Metode-metode tersebut antara lain bantuan rekan sejawat, revidu pasca aktivitas, evaluasi kegiatan, komunitas praktisi, wawancara perekaman pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, forum transfer pengetahuan, pembimbingan, dan mentoring sebagaimana tercantum pada Peraturan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan BPK. Adapun target, realisasi, dan capaian IKU Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan pada periode Renstra Tahun 2020-2024 sebagaimana pada Tabel 16 berikut.

Tabel 16. Target, Realisasi, dan Capaian IKU 10 pada Periode Renstra Tahun 2020-2024

IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi *)	100%	100%	110%	110%	106,88%
Capaian	100	100	105	105	105
Persentase Realisasi Tahun 2024 terhadap Target Tahun 2024	106,88%				

Realisasi IKU Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan Tahun 2024 adalah sebesar 106,88% dari target sebesar 100% sehingga capaiannya sebesar 105. Realisasi sebesar 106,88% tersebut diperoleh dari 100% tingkat penyusunan *best practice* dan 113,75% tingkat pelaksanaan aktivitas MP. Hal ini menunjukkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur sangat mendorong praktik *best practice* dan aktivitas MP kepada para pegawai agar dapat memaksimalkan segala kemampuan dan kompetensi yang ada dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPK dan mengembangkan pengetahuan yang telah dimiliki.

Realisasi IKU ini pada Tahun 2024 lebih rendah dibandingkan. Penurunan realisasi tersebut disebabkan oleh adanya perubahan formula perhitungan dari IKU 10 ini sendiri. Meskipun demikian, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur berhasil mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Ketercapaian tersebut didukung oleh peningkatan pelaksanaan manajemen pengetahuan di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur. Selama Tahun 2024, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur telah mengusulkan BP terkait Aplikasi “SIGAP” (Sistem Gabungan Aplikasi Pemeriksaan) Perencanaan” dan telah diakui oleh Direktorat PSMK. Tidak hanya itu, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur juga telah melaksanakan 8 jenis aktivitas Manajemen Pengetahuan dengan 23 kegiatan sebagaimana pada Tabel 17 berikut.

Tabel 17. Pelaksanaan Aktivitas Manajemen Pengetahuan

No	Nama Aktivitas MP	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Kegiatan
1	Bantuan Rekan Sejawat ( <i>peer assist</i> )	Bantuan rekan sejawat pemeriksaan atas LKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023	25 Januari 2024	1



No	Nama Aktivitas MP	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Kegiatan
		Bantuan rekan sejawat pemeriksaan atas LKPD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023	25 Januari 2024	1
		Bantuan rekan sejawat pemeriksaan atas LKPD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2023	25 Januari 2024	1
		Bantuan rekan sejawat pemeriksaan atas LKPD Kota Bontang Tahun Anggaran 2023	25 Januari 2024	1
		Bantuan rekan sejawat pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023	25 Januari 2024	1
		Bantuan rekan sejawat pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2023: 1. Gambaran umum temuan pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2022 2. Gambaran umum temuan pemeriksaan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan Instansi Terkait Lainnya	25 Januari 2024	2
		Bantuan rekan sejawat pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2023	25 Januari 2024	1
		Bantuan rekan sejawat pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2023	25 Januari 2024	1
		Bantuan rekan sejawat pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2023	25 Januari 2024	1
		Bantuan rekan sejawat pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023	25 Januari 2024	1
		Bantuan rekan sejawat pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2023 1. Gambaran umum temuan pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2022	25 Januari 2024	2



No	Nama Aktivitas MP	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Kegiatan
		2. Gambaran umum temuan Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Mahulu TA 2022-2023		
2	Diklat	Diklat Persiapan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023	15 s.d. 19 Januari 2024	1
		Diklat Penulisan Berita dan Publikasi pada Media Sosial	8 s.d. 9 Agustus 2024	1
3	Evaluasi Kegiatan ( <i>restropect</i> )	Visitasi Dinas Kesehatan Kota Samarinda	5 Juni 2024	1
		Evaluasi Rapat Struktural	5 Juni 2024	1
		Evaluasi Lapangan oleh Tim Penilai WBBM dari MENPANRB	12 November 2024	1
4	Reviu Pasca Aktivitas	Reviu Pasca Aktivitas terkait Penyerahan LHP LKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	13 Mei 2024	1
5	Wawancara Perekaman Pengetahuan ( <i>Retention Interview</i> )	Wawancara Perekaman Pengetahuan ( <i>Retention Interview</i> ) melalui agenda Podcast Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dengan Koran Kaltim terkait Proses Bisnis BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur	4 Juni 2024	1
6	Mentoring	Mentoring Pemeriksaan DTT Belanja Daerah	14 Agustus 2024	1
7	<i>Coaching</i>	<i>Coaching</i> terkait Pemeriksaan DTT Belanja Daerah	14 Agustus 2024	1
8	Forum Berbagi Pengetahuan ( <i>Knowledge Transfer Forum</i> )	Penguatan Integritas Melalui Kebijakan SMAP, Penugasan IATF, dan Tinjauan Litigasi atas Temuan Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur	16 Agustus 2024	1
<b>Total Kegiatan</b>				<b>23</b>



Gambar 12. Verifikasi Lapangan Tim Penilai WBBM KemenPAN-RB

Dalam upaya meningkatkan capaian IKU Penerapan Manajemen Pengetahuan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur akan berupaya memaksimalkan penerapan manajemen pengetahuan yang didasari oleh kebutuhan peningkatan mutu kinerja dan pengambilan keputusan, mitigasi risiko hilangnya pengetahuan, mitigasi risiko pengulangan pekerjaan yang sama, mitigasi risiko kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan, kebutuhan standarisasi kompetensi SDM, dan kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas dan penciptaan inovasi karena menyadari pentingnya manajemen pengetahuan bagi kemajuan organisasi BPK. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur akan terus mendorong unit kerja untuk mengusulkan inovasi yang bisa diakui sebagai *best practice* dan terus menginisiasi penyelenggaraan manajemen pengetahuan seperti diklat maupun KTF.

Realisasi IKU Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan Tahun 2024 sebesar 106,88% yang telah mencapai target yang ditentukan ini akan menjadi *baseline* dalam pengukuran kinerja organisasi pada pelaksanaan Renstra di periode mendatang.

#### 11. Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi

Tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi adalah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pemangku kepentingan atas hubungan, kerjasama, dan komunikasi yang dilakukan oleh BPK Perwakilan yang bertujuan untuk mendorong Perwakilan agar meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama, dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan BPK Perwakilan.

Pengukuran IKU ini menggunakan Laporan Hasil Survei yang diselenggarakan oleh pihak ketiga dengan skala hasil survei sebagai berikut.

- a. 1,00 – 1,99 = sangat tidak memuaskan
- b. 2,00 – 2,99 = tidak memuaskan
- c. 3,00 – 3,99 = memuaskan
- d. 4,00 – 5,00 = sangat memuaskan

Adapun target, realisasi, dan capaian IKU Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi pada periode Renstra Tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel 18 berikut.

Tabel 18. Target, Realisasi, dan Capaian IKU 11 pada Periode Renstra Tahun 2020-2024

IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	Memuaskan (3,8)	Memuaskan (3,8)	Memuaskan (3,8)	Memuaskan (3,8)	Memuaskan (3,8)
Realisasi *)	Memuaskan (3,73)	Memuaskan (3,81)	Memuaskan (3,92)	Sangat Memuaskan (4,34)	Sangat Memuaskan (4,17)
Capaian	96,16	100,26	103,16	105	105
Persentase Realisasi Tahun 2024 terhadap Target Tahun 2024	4,17 - Sangat Memuaskan				

Realisasi IKU Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi Tahun 2024 adalah sebesar 4,17 (Sangat Memuaskan) dari target sebesar 3,8 (Memuaskan) sehingga capaiannya sebesar 105. Hal ini menunjukkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur telah berupaya meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerja sama, dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di lingkungan BPK Perwakilan.

Realisasi IKU ini pada Tahun 2024 lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun masih lebih tinggi dibandingkan dengan target yang ditentukan. Hal ini disebabkan oleh masih belum optimalnya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dalam memberikan pemahaman dan informasi tugas dan fungsi BPK, baik berkaitan dengan perkembangan yang terjadi di sektor maupun berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara kepada para pemangku kepentingan.

Meskipun realisasi IKU tahun ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan sosialisasi pola komunikasi dan koordinasi kepada para pemangku kepentingan melalui berbagai kegiatan perwakilan diantaranya penyerahan Laporan Keuangan

*Unaudited* dari Entitas kepada BPK Perwakilan, *Entry Meeting* dan *Exit Meeting* Kegiatan Pemeriksaan, pembahasan entitas dengan tim pemeriksa, kunjungan kerja para pemangku kepentingan (instansi vertikal/DPRD/Pemerintah Daerah), penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan, Kunjungan Mahasiswa dan Dosen untuk mengenal lebih dekat BPK, melaksanakan kegiatan BPK Mendengar, melakukan kegiatan BPK *Goes to School*, Pelaksanaan TLRHP & Penyelesaian Kerugian Daerah, dan kegiatan - kegiatan visitasi, seperti dari komisi informasi dan Pemerintah Kabupaten Berau.



Gambar 13. BPK Goes to School di SMKN 1 Balikpapan

Diharapkan capaian yang telah melebihi target Tahun 2024 ini dapat dipertahankan dan ditingkat di tahun - tahun mendatang melalui perbaikan kualitas komunikasi kepada para pemangku kepentingan dengan meningkatkan pemahaman BPK atas kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, melakukan standarisasi pusat informasi dan komunikasi (PIK), memfasilitasi pengembangan kerja sama dengan lembaga - lembaga non pemerintah khususnya yang menjadi responden survei, pengembangan inovasi dari berbagai macam sarana dan prasarana komunikasi baik melalui platform sosial media seperti *website*, *youtube*, *instagram*, *twitter*, *whatsapp*, maupun penyediaan Ruang Edukasi, Pengaduan dan Komunikasi (REAKSI) pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, dan tetap melaksanakan kegiatan – kegiatan yang membangun serta meningkatkan kualitas komunikasi dengan para pemangku kepentingan.

Realisasi IKU Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi Tahun 2024 dengan kategori sangat memuaskan (4,17) yang telah melebihi target yang ditentukan ini akan menjadi *baseline* dalam pengukuran kinerja organisasi pada pelaksanaan Renstra di periode mendatang.

## 12. Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi

Pemenuhan pengembangan kompetensi diatur sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai berikut.

- a. Standar jam pelatihan bagi pemeriksa paling tidak 80 jam pendidikan dalam 2 tahun (SPKN);
- b. Standar jam pelatihan bagi non pemeriksa paling tidak 20 jam pendidikan dalam 1 tahun (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014);
- c. Standar pengembangan kompetensi di BPK adalah 40 JP setahun untuk pemeriksa dan 20 JP setahun untuk non pemeriksa;
- d. Pengembangan kompetensi yang dimaksud tidak termasuk Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional dan Diklat Kepemimpinan.

Indikator ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan pegawai BPK. Adapun target, realisasi, dan capaian IKU Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi pada Periode Renstra Tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel 19 berikut.

Tabel 19. Target, Realisasi, dan Capaian IKU 12 pada Periode Renstra Tahun 2020-2024

IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi *)	100%	100%	100%	100%	100%
Capaian	100	100	100	100	100
Persentase Realisasi Tahun 2024 terhadap Target Tahun 2024	100,00%				

Realisasi IKU Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi Tahun 2024 adalah sebesar 100% dari target sebesar 100% sehingga capaiannya sebesar 100 yang diperoleh dari persentase jumlah pegawai yang telah memenuhi jam diklat dibandingkan dengan jumlah seluruh pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur telah berupaya mendorong pendidikan berkelanjutan bagi pegawai BPK.

Realisasi IKU ini pada Tahun 2024 tercapai sama dengan tahun sebelumnya. Ketercapaian tersebut didukung oleh berbagai upaya yang telah dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur seperti inventarisasi jam diklat para pegawai, pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemenuhan jam diklat pegawai tiap triwulannya, penawaran diklat kepada para pegawai tiap triwulan, dan pengelolaan pelaksanaan diklat para pegawai.





Gambar 14. Pelaksanaan Diklat Penulisan Berita dan Publikasi pada Media Sosial

Diharapkan capaian Tahun 2024 ini dapat terus dipertahankan melalui peningkatan pelaksanaan diklat pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, berperan aktif dalam mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti diklat, dan percepatan monitoring dan evaluasi pemenuhan jam diklat pegawai.

Realisasi IKU Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi Tahun 2024 sebesar 100% yang telah sesuai target yang ditentukan ini akan menjadi *baseline* dalam pengukuran kinerja organisasi pada pelaksanaan Renstra di periode mendatang.

### 13. Tingkat Kinerja Anggaran

Tingkat Kinerja Anggaran mengukur capaian Kinerja atas perencanaan dan penggunaan anggaran berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023 yang dilakukan pada Satuan Kerja yang memiliki dokumen anggaran (DIPA) mandiri.

Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat EKA Perencanaan Anggaran adalah serangkaian proses untuk melakukan pengukuran, penilaian dan analisis secara sistematis dan objektif atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran.

EKA Perencanaan Anggaran sesuai KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran, yang diukur dengan dua variabel sebagai berikut.

- a. Efektivitas, diukur dengan capaian RO (75%)
- b. Efisiensi, diukur dari penggunaan SBK (10%) serta efisiensi SBK (15%)

Sementara EKA Pelaksanaan Anggaran yang merupakan rangkaian aktivitas terintegrasi dalam rangka *mereview*, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran belanja pada Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran EKA Pelaksanaan



Anggaran berdasarkan PMK Nomor 195 Tahun 2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, adalah sebagai berikut.

- a. Revisi DIPA (10%)
- b. Deviasi Halaman III DIPA (10%)
- c. Penyerapan Anggaran (20%)
- d. Belanja Kontraktual (10%)
- e. Penyelesaian Tagihan (10%)
- f. Pengelolaan UP dan TUP (10%)
- g. Dispensasi SPM (5%)
- h. Capaian *output* (25%).

Indikator ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut. Adapun target, realisasi, dan capaian IKU Tingkat Kinerja Anggaran pada periode Renstra Tahun 2020-2024 sebagaimana Tabel 20 berikut.

*Tabel 20. Target, Realisasi, dan Capaian IKU 13 pada Periode Renstra Tahun 2020-2024*

IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	87%	87,50%	88%	88,50%	84,50%
Realisasi *)	90,22%	91,04%	91,08%	89,58%	92,50%
Capaian	103,71	104,05	103,5	101,22	105
Persentase Realisasi Tahun 2024 terhadap Target Tahun 2024	92,50%				

Realisasi IKU Tingkat Kinerja Anggaran Tahun 2024 adalah sebesar 92,50% dari target sebesar 84,50% sehingga capaiannya sebesar 105 yang diperoleh dari persentase nilai EKA Perencanaan Anggaran sebesar 85% dan nilai EKA Pelaksanaan Anggaran sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur mampu mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK.

Realisasi IKU ini pada Tahun 2024 tercapai lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. Upaya yang telah dilaksanakan BPK Perwakilan Kalimantan Timur adalah dengan melakukan rapat koordinasi evaluasi pengelolaan anggaran TA 2024 dan Kebijakan TA 2025, menyusun dokumen penganggaran dan pemantauan atas pelaksanaan realisasi anggaran yang tepat guna, menganalisis kegiatan prioritas dan menyusun data capaian *output*, melakukan koordinasi dengan Biro Keuangan dan KPPN terkait penilaian tingkat kinerja anggaran, penyelenggaraan tertib layanan administrasi keuangan dengan menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan,

serta pelaksanaan kegiatan berdasarkan Rincian Kertas Kerja Satker/Dokumen Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).



Gambar 15. Rapat Evaluasi Kinerja Anggaran

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian IKU tingkat kinerja anggaran, BPK Perwakilan Kalimantan Timur akan terus berusaha untuk melakukan:

- a. Koordinasi dan sinergi internal satker antara KPA, PPK, PPSPM, Bendahara, Operator agar dapat mengelola dan menghimpun kebutuhan revisi anggaran dalam kewenangan pagu tetap yang disahkan oleh Kementerian Keuangan;
- b. Melakukan pemutakhiran RPD pada halaman III DIPA dan disiplin dalam melaksanakan kegiatan dan pencairan dana;
- c. Melakukan pemantauan uang persediaan melalui kartu pengawasan UP dan TUP;
- d. Memperhatikan periode pengajuan SPM GUP dari SP2D UP/GUP dan tidak menambah frekuensi SPM GUP terlambat;
- e. Sosialisasi rencana aksi pelaksanaan anggaran sesuai RKP dan RKSP;
- f. Pemantauan realisasi anggaran;
- g. Memperhatikan ketersediaan sumber daya manusia, waktu, sarana dan prasarana keuangan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan;
- h. Pemantauan proses pengelolaan keuangan dan anggaran terkait pencapaian keluaran; dan
- i. penyusunan laporan keuangan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara.

Realisasi IKU Tingkat Kinerja Anggaran Tahun 2024 sebesar 92,50% yang telah sesuai target yang ditentukan ini akan menjadi *baseline* dalam pengukuran kinerja organisasi pada pelaksanaan Renstra di periode mendatang.

### C. Analisis Efisiensi

Dalam rangka mewujudkan pencapaian strategi 2 yaitu Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif serta memberikan pelayanan

prima kepada stakeholder dilakukan upaya efisiensi yang dapat mendorong terlaksananya kegiatan dan pelayanan yang lebih baik. Upaya-upaya efisiensi yang dimaksud antara lain berupa pemanfaatan teknologi informasi, pengelolaan BMN, efisiensi anggaran sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

#### 1. Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

Pemanfaatan teknologi dan informasi memberikan dukungan terhadap efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur. Pelaksanaan segala aktivitas yang mendukung capaian kinerja dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien dengan adanya pemanfaatan teknologi dan informasi. Berikut upaya efisiensi yang dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dalam pemanfaatan teknologi dan informasi diantaranya sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan pemanfaatan layanan teknologi dan informasi yang disediakan oleh BPK. Pemanfaatan ini memberikan dampak pada efisiensi waktu pengelolaan administrasi dokumen baik di bidang pemeriksaan maupun kesekretariatan. Seperti pemanfaatan berbagai macam aplikasi pemeriksaan seperti SiAP LK, SiAP Banparpol, Bidics, e audit, DEP, SMP, SiPTL, JDIH, SIKAP, SMH, portal ilmu, layanan manajemen seperti aplikasi sisdm, prisma, jasmin, elearning, perpustakaan, melati, WBS, PPG, dan lain-lain.
- b. Pemanfaatan media daring seperti *Microsoft Teams* dan *Zoom* untuk rapat dapat mengurangi biaya jamuan rapat dan biaya operasional lainnya.

#### 2. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)

Upaya yang dilaksanakan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dalam efisiensi BMN antara lain sebagai berikut:

- a. Merencanakan dan merealisasi belanja modal dengan fokus utama untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- b. Melakukan pemindahtanganan melalui penjualan atau penghapusan BMN yang sudah tidak lagi diperlukan untuk mengurangi biaya pemeliharaan dan turut serta dalam meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- c. Melaksanakan sewa sebagai bentuk optimalisasi penggunaan BMN serta turut serta dalam meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- d. Melakukan optimalisasi penggunaan aplikasi pengelolaan BMN agar data ataupun laporan yang dihasilkan lebih valid dan berkualitas; dan
- e. Melaksanakan inventarisasi atas BMN untuk pengecekan kebenaran atas keberadaan BMN sehingga dapat mendukung terwujudnya keandalan data atas BMN yang dimiliki BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.

#### 3. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur telah menciptakan dan merencanakan pelaksanaan aktivitas manajemen pengetahuan yang untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi pegawai guna mendukung percepatan pelaksanaan tugas dan fungsi di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur seperti dengan melaksanakan kegiatan diklat, mentoring, coaching, FGD, dan KTF.

#### 4. Efisiensi Penggunaan Anggaran

Upaya yang dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dalam efisiensi penggunaan anggaran antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan evaluasi terhadap anggaran tahun berjalan, serta mengidentifikasi pos anggaran yang memiliki prioritas rendah dan masih dapat diefisiensikan;
- b. Memfokuskan penggunaan anggaran pada program yang secara langsung mendukung pelaksanaan *core business* BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, serta menunda atau mengurangi kegiatan yang bersifat seremonial;
- c. Mengefisiensikan proses pengadaan dan menunda pelaksanaan kontrak sesuai dengan arahan dalam Instruksi Presiden (Inpres); dan
- d. Membatasi perjalanan dinas hanya untuk kegiatan yang bersifat penting.

Dalam pencapaian setiap indikator kinerja, upaya-upaya efisiensi yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur disajikan dalam Tabel 21 sebagai berikut.

Tabel 21. Upaya Efisiensi yang Dilakukan pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Berkaitan dengan Capaian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja	Upaya Efisiensi
<b>IKU 1</b> Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur telah menyelenggarakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas mutu pemeriksaan yang dilakukan dengan berkolaborasi bersama Badan/Balai Diklat dan Biro SDM. Kegiatan yang telah dilakukan selama Tahun 2024 berkaitan dengan pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan dan tingkat penerapan manajemen pengetahuan antara lain sebagai berikut.
<b>IKU 10</b> Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bantuan rekan sejawat pemeriksaan atas LKPD dari tim pemeriksa terdahulu kepada tim pemeriksa pemeriksaan tahun berjalan tentang gambaran umum temuan pemeriksaan.</li> <li>b. Diklat Pemeriksaan LKPD TA 2023.</li> <li>c. Diklat Penulisan Berita dan Publikasi pada Media Sosial</li> <li>d. Evaluasi Kegiatan (Rapat Struktural dan Evaluasi oleh Tim Penilai WBBM dari KemenPAN-RB).</li> <li>e. Reviu Pasca Aktivitas terkait Penyerahan LHP LKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur</li> <li>f. Mentoring dan <i>coaching</i> terkait Pemeriksaan DTT Belanja Daerah</li> <li>g. Penguatan Integritas Melalui Kebijakan SMAP, Penugasan IATF, dan Tinjauan Litigasi atas Temuan Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur</li> </ol> Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur juga mengoptimalkan pemanfaatan panduan <i>check list</i> penjaminan mutu pelaporan hasil pemeriksaan guna meningkatkan ketelitian dan kecermatan dalam proses <i>review</i>

	hasil pemeriksaan sehingga LHP yang dihasilkan akurat dan konsisten.
<b>IKU 2</b> Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	Penggunaan beberapa aplikasi seperti SiAP, BIDICS, dan SIRUP LKPP merupakan bentuk upaya efisiensi yang dilakukan oleh pemeriksa dalam melakukan kegiatan pemeriksaan. Penggunaan aplikasi ini dapat mempercepat pemeriksa menganalisis data yang dibutuhkan dalam pemeriksaan sehingga menunjang capaian hasil pemeriksaan yang memenuhi harapan penugasan.
<b>IKU 3</b> Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur melakukan berbagai upaya untuk mendorong penyelesaian ganti kerugian negara dengan melaksanakan pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP). Dalam pelaksanaan TLRHP, upaya efisiensi kinerja yang dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur yaitu dengan penggunaan aplikasi untuk memudahkan komunikasi jarak jauh seperti <i>Whatsapp</i> yang diwujudkan dengan aktif berkoordinasi via pesan <i>Whatsapp</i> dan <i>Zoom</i> dengan para personel kunci entitas untuk mengunggah data dari aplikasi SiPTL dan memanfaatkannya dengan maksimal guna mempercepat proses penelaahan TLHP.
<b>IKU 4</b> Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional dan	Upaya dalam pemenuhan tingkat keterlibatan satuan kerja dalam pemeriksaan tematik lokal dan nasional adalah dengan melakukan beberapa koordinasi dan konsultasi bidang pemeriksaan secara daring menggunakan aplikasi <i>Zoom Meeting</i> yang dapat mengurangi biaya seperti <i>workshop</i> persiapan pemeriksaan kinerja tematik nasional PN 6, pemeriksaan kinerja tematik nasional PN 7, dan diskusi persiapan pemeriksaan DTT. Selain itu, pemanfaatan berbagai aplikasi pemeriksaan yang telah disediakan seperti SMP, SiAP, dan SiPTL juga mampu mempercepat proses pelaksanaan dan monitoring pemeriksaan.
<b>IKU 6</b> Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	
<b>IKU 7</b> Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Selain melalui pelaksanaan arahan, motivasi, serta pemberian teladan yang baik dari para pimpinan dan pejabat struktural, implementasi nilai dasar BPK juga dilakukan melalui monitoring data pegawai pemeriksa yang memiliki hubungan kepentingan dengan entitas pemeriksaan sebagai bahan pertimbangan penugasan. Selain itu, telah dilakukan pengarahan Kepala Perwakilan terkait Nilai Dasar BPK, Internalisasi Budaya Kerja Anti Korupsi, serta telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai terkait visi, misi, dan budaya kerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.
<b>IKU 8</b> Hasil Evaluasi AKIP	BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja melalui



	<p>penyusunan rencana aksi pencapaian kinerja, pelaksanaan rapat pelaksanaan kegiatan anggaran dan kinerja, penyusunan laporan pemantauan kinerja, dan penggunaan aplikasi dalam memantau kinerja harian pegawai.</p> <p>BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan perbaikan akuntabilitas kinerja dengan memperhatikan rekomendasi-rekomendasi yang telah disampaikan Itama sehingga hasil kinerja dan capaian evaluasi AKIP meningkat Tahun 2024.</p>
<p><b>IKU 9</b> Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi</p>	<p>Dalam upaya efisiensi pencapaian indikator kinerja tingkat pemanfaatan teknologi dan informasi, Subbagian Umum dan TI melakukan pemantauan terhadap pemenuhan setiap aspek penilaian dari IKU ini. Selain itu, Kepala Perwakilan selalu ikut memonitor dan menghimbau seluruh pegawai untuk melakukan pemutakhiran data masing – masing pegawai pada aplikasi SISDM, menindaklanjuti surat masuk pada JASMIN, penginputan data pemeriksaan ke aplikasi SMP, pemanfaatan aplikasi SiAP, dan pemanfaatan aplikasi SiPTL.</p>
<p><b>IKU 11</b> Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi</p>	<p>Bidang Humas dan Tata Usaha Kesekretariatan (HTUK) BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur telah berupaya memanfaatkan sarana prasarana dengan maksimal untuk mengefisiensikan waktu, SDM, dan biaya dalam pencapaian kualitas komunikasi di satuan kerja. Sarana Prasarana tersebut antara lain:</p>
<p><b>IKU 5</b> Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemanfaatan ruang PIK sebagai pelaksana tugas teknis PPID BPK, bertugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan permintaan informasi publik dan pengaduan masyarakat.</li> <li>b. Pemanfaatan ruang Ruang Pengaduan dan Ajang Komunikasi (REAKSI) untuk mewedahi pihak eksternal maupun para pemangku kepentingan untuk melakukan koordinasi dengan internal BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.</li> <li>c. Pemanfaatan E-PPID sebagai sarana layanan online publik untuk mengajukan permohonan informasi dan menyampaikan pengaduan masyarakat sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.</li> </ol> <p>Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur juga melaksanakan kegiatan <i>Media Gathering</i> dan <i>BPK Goes to School/Campus</i> sebagai bentuk komunikasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dengan pihak-pihak eksternal.</p>
<p><b>IKU 12</b> Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi</p>	<p>Pemenuhan jam Diklat dilakukan oleh seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur setiap tahun untuk pengembangan kompetensinya. Dalam upaya efisiensi pemenuhan jam diklat, Subbagian SDM BPK Perwakilan</p>



	<p>Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan pendataan pemenuhan jam diklat bagi setiap pegawai.</p> <p>Selain itu, untuk mempermudah komunikasi dengan calon peserta diklat, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur memanfaatkan media komunikasi Whatsapp. Konfirmasi calon peserta diklat sebelumnya dilakukan dengan komunikasi langsung sehingga dibutuhkan waktu khusus untuk bertemu dan melakukan konfirmasi atas kehadiran calon peserta diklat. Untuk melakukan efisiensi waktu dalam penyelenggaraan diklat, Subbagian SDM menggunakan media <i>Whatsapp broadcast</i> yang disebar secara simultan kepada seluruh calon peserta diklat dengan tujuan untuk mengonfirmasi keikutsertaan calon peserta dalam kegiatan diklat. Hal ini memberikan dampak terhadap efisiensi waktu dalam pendataan peserta diklat.</p>
<p><b>IKU 13</b> Tingkat Kinerja Anggaran</p>	<p>Pada bidang keuangan, upaya efisiensi yang dilakukan dengan monitoring secara periodik oleh Sekretariat Perwakilan dengan unit kerja bersangkutan guna mengurangi ketidaksesuaian dan keterlambatan realisasi capaian keluaran. Kemudian, melakukan monitoring penyerapan anggaran melalui Aplikasi SAKTI dan SINTAG dengan tetap mengoptimalkan penyerapan anggaran dengan mengalihkan pada kegiatan-kegiatan yang berpotensi terdapat penyerapan anggaran yang cukup signifikan.</p> <p>Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur selalu memperhatikan penilaian Direktorat Jenderal Perbendaharaan terhadap Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebagai langkah perbaikan dalam tata kelola keuangan dan guna meningkatkan pencapaian kinerja anggaran</p>

#### D. Perubahan Budaya Kerja

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur terus memberikan sinergi dalam upaya membentuk kinerja pegawai terbaik, salah satunya dengan membentuk suatu budaya kerja di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur yaitu “**BERKINERJA**” yang merupakan akronim dari **Ber**kompeten, **Integritas**, **Jujur** dan **Amanah** serta dilengkapi juga dengan moto pelayanan “**MEMUASKAN**” yang merupakan akronim dari **Mengutamakan Profesional, Unggul, Tuntas, dan Meyakinkan**.

*Core Values* “BERKINERJA” dan moto “MEMUASKAN” menjadi identitas baru bagi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur yang sekaligus mencerminkan pola kerja instansi, hasil pencapaian kinerja yang telah diraih serta yang akan dipupuk untuk mendukung Renstra BPK Tahun 2020-2024. Penjabaran nilai “BERKINERJA” dan “MEMUASKAN” sebagaimana pada Tabel 22 berikut.

Tabel 22. Penjabaran Core Values BERKINERJA dan Moto Memuaskan

BERKINERJA	
<p style="text-align: center;"><b>Berkompeten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Melakukan <i>assessment</i> pegawai</li> <li>● Memberikan diklat/FGD/KTF bagi para pegawai</li> <li>● Menempatkan pegawai sesuai kompetensi</li> <li>● Mengimplementasikan manajemen pengetahuan dalam penambahan pegawai</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Integritas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Membuat monitoring <i>whistle blowing system</i> serta sosialisasi penguatan nilai-nilai integritas secara periodik</li> <li>● Melakukan survei atas layanan pemeriksaan secara daring (SULAP <i>online</i>) yang melibatkan pihak eksternal (entitas) sebagai responden yang bebas dan independen</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>Jujur</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Menyusun dan melaporkan LHKPN dan/atau LHKASN</li> <li>● Membuat mekanisme PPG yang mudah diakses serta sosialisasi penanganan gratifikasi</li> <li>● Menyusun hasil pemeriksaan secara objektif yang didukung dengan data yang cukup dan tepat</li> <li>● Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pembinaan mental dan spiritual pegawai melalui pengajian/ siraman rohani</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Amanah</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Menetapkan SOP setiap pekerjaan</li> <li>● Menetapkan keputusan Kalan tentang standar perilaku</li> <li>● Menyelesaikan pemeriksaan tepat waktu</li> <li>● Melakukan kegiatan pembahasan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan secara periodik</li> <li>● Melakukan pemantauan kerugian negara baik TP maupun TGR</li> <li>● Melaksanakan kegiatan-kegiatan PKU/ <i>Outbound</i> dan kegiatan-kegiatan bersifat sosial</li> </ul>
MEMUASKAN	
<p style="text-align: center;"><b>Profesional</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Menjalankan layanan pemeriksaan sesuai standar pemeriksaan (SPKN, PMP, dan SIAP)</li> <li>● Menjalankan layanan non pemeriksaan sesuai dengan prosedur operasional standar yang berlaku pada layanan pemberian informasi publik; Layanan Tamu; Layanan Penanganan Pengaduan; Layanan Pengelolaan dan Peminjaman Arsip; Layanan Pelaksanaan dan penerimaan siswa prakerin; layanan perpustakaan; layanan konsultasi hukum online; survei atas layanan pemeriksaan secara online; Layanan lainnya yang ditetapkan oleh BPK Kaltim</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Unggul</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Meningkatkan kualitas layanan publik yang telah dibangun pada saat meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) diantaranya: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aplikasi SULAP Online</li> <li>- Aplikasi Klinik Hukum <i>Online</i></li> <li>- Aplikasi Layanan Tamu</li> <li>- Aplikasi Pengaduan</li> <li>- Aplikasi APPUS</li> <li>- BPK <i>Learning</i></li> </ul> </li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>Tuntas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Peningkatan persentase penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi BPK</li> <li>● Melakukan survei kepuasan atas layanan yang diberikan</li> <li>● Menyelesaikan tupoksi secara lengkap dan menyeluruh sesuai target yang direncanakan</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Meyakinkan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Melakukan quality control dari atasan langsung</li> <li>● Reward dan Punishment system yang dilaksanakan secara tertib</li> <li>● Melakukan QA dan QQ atas hasil pemeriksaan</li> </ul>

## E. Realisasi Anggaran

Berdasarkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024 dalam mewujudkan kinerja organisasi, rincian output, dan indikator kinerja, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur memiliki alokasi anggaran sebesar Rp25.667.742.000,00 yang terbagi menjadi realisasi atas rencana Kerja Pemeriksaan (RKP) dan Rencana Kerja Sekretariat dan Penunjang (RKSP). Berikut rincian realisasi anggaran dari tiap-tiap rencana kerja sebagaimana Tabel 23 dan 24 berikut.

Tabel 23. Perbandingan Realisasi Anggaran, Rincian Output (RO), dan Indikator Kinerja RKP  
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

No	Uraian RO	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi RO	%	Indikator Kinerja
1	LHP atas bantuan keuangan partai politik pada BPK perwakilan	213.774.000,00	213.772.639,00	100,00	103	100,00	1.Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan
2	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	13.635.000,00	13.634.260,00	99,99	1	100,00	2.Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan
3	Sumbangan IHPS Perwakilan	136.401.000,00	136.396.543,00	100,00	2	100,00	3.Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
4	Laporan Profil Entitas Perwakilan	32.830.000,00	32.829.240,00	100,00	11	100,00	4.Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional
5	Laporan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada BPK Perwakilan	438.435.000,00	438.434.945,00	100,00	22	100,00	5.Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan
6	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah pada BPK Perwakilan	151.017.000,00	151.016.825,00	100,00	22	100,00	6.Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal
7	Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan	1.152.281.000,00	1.086.969.965,00	94,33	12	100,00	
8	LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur	9.057.203.000,00	9.057.195.273,00	100,00	21	100,00	
	<b>Total</b>	11.195.576.000,00	11.130.249.690,00	99,42	194	100,00	

Total anggaran Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP) tahun 2024 adalah sebesar Rp11.195.576.000,00 dengan realisasi sebesar Rp11.130.249.690,00 atau sebesar 99,42%. Penyerapan anggaran sebesar 99,42% tersebut telah digunakan untuk merealisasikan keluaran dengan total 194 keluaran atau sebesar 100,00% dari target keluaran Tahun Anggaran 2024. Pelaksanaan anggaran pada RKP ini telah dilaksanakan untuk memenuhi

kebutuhan pada indikator kinerja pertama hingga keenam guna mencapai sasaran meningkatnya pemeriksaan berkualitas.

Tabel 24. Perbandingan Realisasi Anggaran, Rincian Output (RO), dan Indikator Kinerja RKSP  
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

No	Uraian RO	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Rea- lisasi RO	%	Indikator Kinerja
1	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	118.200.000,00	118.200.000,00	100,00	17	100,00	7.Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK 8.Hasil Evaluasi AKIP
2	Layanan Perkantoran	12.160.972.000,00	12.134.410.174,00	99,78	1	100,00	9.Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi
3	Layanan Sarana Internal	334.070.000,00	329.884.796,00	98,75	45	100,00	10.Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan
4	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	1.858.924.000,00	1.818.762.568,00	97,84	21	100,00	11.Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi 12.Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi 13.Tingkat Kinerja Anggaran
<b>Total</b>		14.472.166.000,00	14.401.257.538,00	99,51	84	100,00	

Total anggaran pada Rencana Kerja Sekretariat dan Penunjang (RKSP) adalah sebesar Rp14.472.166.000,00 dan telah direalisasikan untuk menunjang peningkatan layanan pemeriksaan sebesar Rp14.401.257.538,00 atau sebesar 99,51%. Penyerapan anggaran sebesar 99,51% tersebut digunakan untuk merealisasikan 84 keluaran dengan persentase capaian sebesar 100,00%. Pelaksanaan anggaran pada RKSP ini dilakukan guna memenuhi indikator kinerja ke tujuh hingga ke tiga belas.

## F. Inovasi

Dalam rangka menghasilkan pemeriksaan yang bermutu tinggi, BPK menjamin pemeriksa memiliki keahlian yang diperlukan. Hal ini termasuk pengetahuan dan pengalaman praktis dari pemeriksaan yang dilakukan, pemahaman atas standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemahaman tentang operasional entitas, serta kemampuan dan pengalaman untuk mempraktikkan pertimbangan profesional.

BPK melakukan siklus pemeriksaan secara komprehensif dari suatu tahap ke tahap lainnya dalam suatu pemeriksaan yang terdiri dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Dalam perencanaan pemeriksaan berupa proses pembentukan komposisi tim oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan, dilakukan pertimbangan secara matang terkait dengan latar belakang pendidikan, pengalaman, independensi, dan hasil evaluasi kinerja Pemeriksa dalam penugasan sebelumnya.

BPK Kaltim memerlukan suatu alat yang dapat memudahkan Pejabat Struktural Pemeriksaan dan Pemeriksa untuk melaksanakan proses perencanaan pemeriksaan khususnya dalam menyusun komposisi tim pemeriksa. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur telah memiliki Aplikasi Master Properti yang berisi informasi data profil pegawai dengan sumber data yang berasal dari Aplikasi SISDM, Bezzeting, dan Form isian yang diberikan kepada pegawai meliputi informasi yang tidak tercakup oleh SISDM dan Bezzeting. Tujuan Aplikasi ini antara lain untuk menjadi referensi dalam menyusun tim pemeriksaan, mengatur pola mutasi, pengembangan karir pegawai, meningkatkan kompetensi pegawai, meningkatkan *softskill* pegawai, dan mengembangkan *work life balance* pegawai demi peningkatan produktivitas dan inovasi dalam bekerja. Dalam rangka mempermudah analisis proses pemeriksaan, maka data yang telah tersedia dalam aplikasi Master Properti dimanfaatkan untuk membangun aplikasi dashboard SIGAP (Sistem Gabungan Aplikasi Pemeriksaan).

Pada tahap awal, pengembangan aplikasi SIGAP difokuskan pada tahap perencanaan yaitu SIGAP-Perencanaan. SIGAP-Perencanaan mempermudah analisis pembentukan komposisi tim yang didasarkan pada sistem merit dan mempertimbangkan *talent pool* pegawai sehingga menghindari pengambilan keputusan secara subjektif, budaya pemilihan *like and dislike*, benturan kepentingan, serta dependensi sehingga mampu menjawab keresahan bersama terkait dengan pengelolaan SDM yang belum optimal yang mengakibatkan tidak maksimalnya penentuan kualitas tim pemeriksaan.

Pembangunan aplikasi SIGAP-Perencanaan merupakan inovasi *best practice* yang diusulkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024 di bidang pemeriksaan untuk mendukung perencanaan pemeriksaan khususnya pada tahapan penyusunan tim pemeriksa secara tersistem sesuai kriteria dengan mengedepankan nilai-nilai dasar BPK yaitu Independensi, Integritas dan Profesionalisme. Aplikasi ini dibangun melalui beberapa tahapan antara lain *requirement analysis, design system, merancang database, development, testing, deployment, sosialisasi dan maintenance*. Tahapan tersebut dilakukan untuk memperoleh *output* yang ideal sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Tujuan pelaksanaan *best practice* ini adalah:

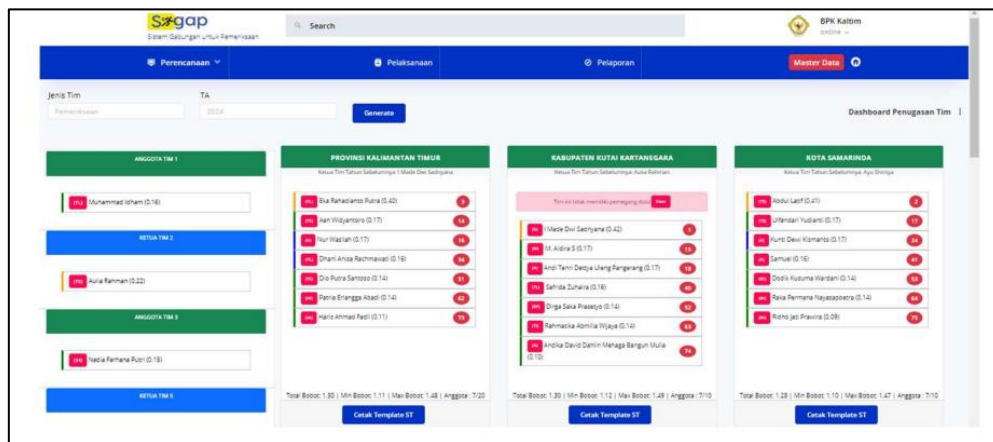
1. Memberikan informasi pemetaan profil pegawai berdasarkan latar belakang pendidikan, riwayat jabatan, pengalaman pemeriksaan, dan profil benturan kepentingan dalam rangka proses perencanaan pemeriksaan;
2. Memberikan *output* berupa susunan tim pemeriksaan yang terotomatisasi dari aplikasi sebagai masukan kepada pimpinan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur untuk bahan pertimbangan dalam pembentukan komposisi tim dengan objektif dan independen; dan
3. Menghasilkan *template* surat tugas pemeriksaan dan dokumen pendukung pemeriksaan berupa surat pernyataan independensi sebagai bentuk deklarasi independensi dalam pemeriksaan yang otomatis dihasilkan dari aplikasi setelah terbentuknya susunan tim pemeriksa.

Selanjutnya, manfaat penggunaan *best practice* ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan proses pengawasan dan evaluasi dalam proses penyusunan tim pemeriksaan sesuai standar dengan mengimplementasikan sistem merit melalui pemetaan kompetensi, keahlian, dan pengalaman pemeriksaan serta menjaga nilai dasar BPK, yaitu integritas, independensi, dan profesional yang diwujudkan dalam pembebasan benturan kepentingan dalam pemeriksaan;
2. Mempermudah pemeriksa dalam menyiapkan *template* surat tugas pemeriksaan dan melengkapi dokumen pemeriksaan berupa Surat Pernyataan Independensi untuk memastikan tim pemeriksa yang terbentuk tidak ada gangguan independensi; dan
3. Mempermudah pimpinan dalam memperoleh informasi terkait riwayat penugasan pemeriksa.

Aplikasi SIGAP-Perencanaan dibangun dengan mempertimbangkan standar kebutuhan perencanaan pemeriksaan yang ideal dan terstruktur sehingga *format database* dapat disesuaikan dengan data pada satuan kerja lainnya. Selain itu aplikasi ini dibangun menggunakan SDM IT dan *analyst* yang mana telah tersedia pada satuan kerja BPK, serta menggunakan perangkat lunak dasar, efisien, dan mendukung modern *workplace*. Kemudahan replikasi tersebut mampu mendukung terwujudnya pemeriksaan yang bermutu tinggi dan berkualitas dalam setiap tahapan pemeriksaan oleh BPK.

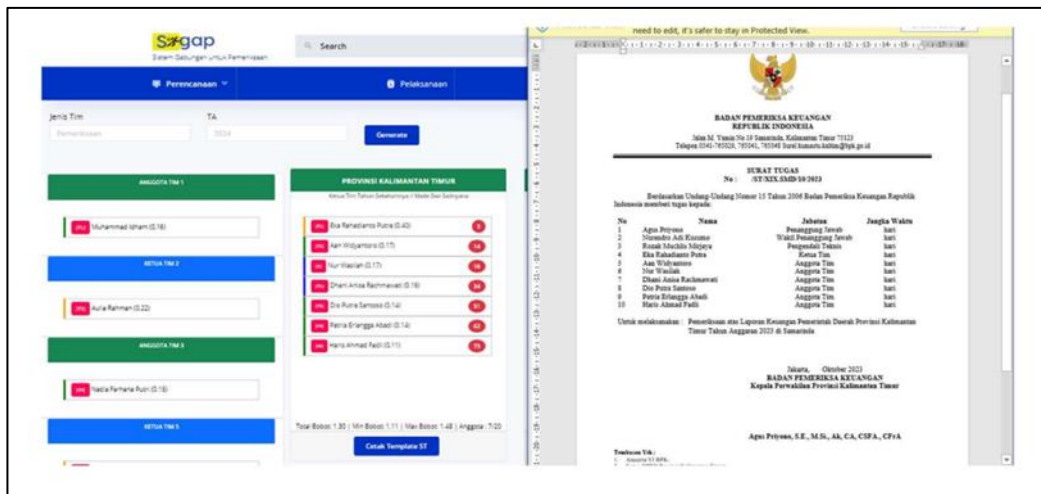
Berikut adalah Gambar 16 berupa tampilan hasil generate komposisi tim dengan aplikasi SIGAP.



Gambar 16. Hasil Generate Komposisi Tim

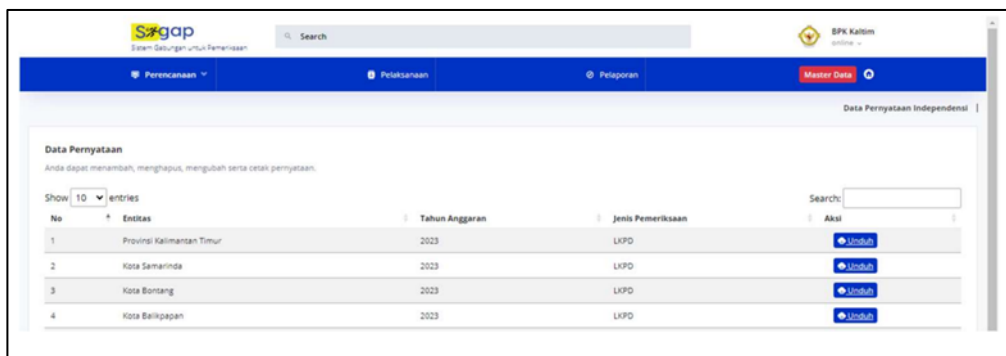


Adapun Gambar 17 berikut tampilan hasil cetak *template* surat tugas pemeriksaan setelah terbentuknya komposisi tim.



Gambar 17. Hasil Cetak Template Surat Tugas

Selanjutnya, Gambar 18 berikut merupakan tampilan dari halaman *generate pernyataan independensi*.



Gambar 18. Halaman Generate Pernyataan Independensi

## G. Penghargaan

Sesuai dengan misi ketiga BPK RI yaitu melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur turut aktif dalam mengikuti beberapa ajang penghargaan internal maupun eksternal sebagai upaya untuk terus berbenah diri, sehingga terus bersinergi dan berkontribusi untuk menghasilkan kinerja terbaik. Adapun penghargaan yang diraih BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur selama Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Predikat WBBM pada Penganugerahan Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) - Kementerian PAN-RB (Eksternal)



*Gambar 19. Peraihan Predikat WBBM Tahun 2024*

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur berhasil meraih predikat Zona Integritas (ZI) Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Penghargaan ini diberikan langsung oleh Menteri PAN-RB, Rini Widyantini, S.H., M.P.M, dalam acara “Satu Dekade Zona Integritas”. Peraihan predikat WBBM bagi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur ini menjadi bukti nyata atas komitmen BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dalam menerapkan reformasi birokrasi serta menciptakan lingkungan kerja yang transparan, akuntabel, bebas dari praktik korupsi dan pelayanan publik yang berkualitas.

2. Terbaik IV “Badan Publik Informatif” Kategori Vertikal Provinsi Kalimantan Timur – Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur (Eksternal)



Gambar 20. Penghargaan sebagai Terbaik IV Badan Publik Informatif

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur kembali meraih penghargaan sebagai Badan Publik Informatif pada kategori Badan Publik Vertikal Provinsi Kaltim. Penghargaan ini diberikan oleh Komisi Informasi Kaltim pada Malam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024. Penghargaan ini mencerminkan upaya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dalam mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah akses publik dan pemenuhan prinsip-prinsip keterbukaan informasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

3. Peringkat Pertama Lomba Souvenir dalam Rangka Memperingati HUT Ke-77 Tahun BPK RI (Internal)



Gambar 21. Peringkat Pertama Lomba Souvenir Festival Seni dan Kreativitas BPK RI

Festival seni dan kreativitas ini dilakukan pada rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati HUT Ke-77 BPK RI. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur berhasil menduduki peringkat pertama dalam kategori lomba souvenir. Desain



Souvenir yang dibuat oleh Dodik Kusuma Wardani berjudul Selendang Motif Tujuh yang menggambarkan 7 bidang tugas BPK, sekaligus persembahan khusus dalam rangka HUT Ke-77 BPK RI.

4. Peringkat Keempat (A “Memuaskan”) Lomba Sadar Tertib Arsip BPK Tahun 2023 (Internal)



Gambar 22. Piagam Penghargaan Peringkat Keempat Lomba Sadar Tertib Arsip BPK Tahun 2023

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur meraih Juara Harapan I dalam Lomba Sadar Tertib Arsip BPK tahun 2023 untuk kategori Unit Kearsipan II. Pengumuman pemenang disampaikan dalam acara *Workshop* Terwujudnya Tertib Arsip BPK yang Akuntabel dan Transparan, yang digelar secara daring pada 9 Oktober 2024. Lomba ini diselenggarakan oleh Biro Umum BPK RI sebagai bagian dari upaya mendukung Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) serta mendorong pengelolaan arsip yang tertib sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan yang berlaku.

5. Peringkat Pertama Kategori Pelayanan Informasi Publik pada Anugerah Kehumasan BPK RI Tahun 2024 (Internal)



Gambar 23. Peringkat Pertama Kategori Pelayanan Informasi Publik pada Anugerah Kehumasan BPK RI Tahun 2024

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur meraih peringkat pertama untuk kategori pelayanan informasi publik pada acara “Anugerah Kehumasan BPK Tahun 2024” yang

digelar oleh Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK RI di Auditorium Gedung Tower Kantor Pusat BPK pada tanggal 25 November 2024. Acara ini digelar dalam rangka memberikan penghargaan atas upaya dan kreativitas kehumasan serta untuk meningkatkan motivasi dan *awareness* dalam kegiatan kehumasan di lingkungan BPK RI mengingat bahwa kehumasan memainkan peran penting dalam penyebaran informasi publik kepada masyarakat.

6. Predikat Akreditasi A Perpustakaan pada Anugerah Kehumasan BPK RI Tahun 2024 (Internal)



Gambar 24. Predikat Akreditasi A Perpustakaan pada Anugerah Kehumasan BPK RI Tahun 2024

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur meraih predikat akreditasi A perpustakaan pada acara “Anugerah Kehumasan BPK Tahun 2024” yang digelar oleh Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK RI di Auditorium Gedung Tower Kantor Pusat BPK pada tanggal 25 November 2024. Atas pencapaian ini, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur akan terus berkomitmen dan berupaya dalam meningkatkan pengelolaan perpustakaan BPK Kaltim ke arah yang lebih baik.



#### **BAB IV PENUTUP**

*LAPORAN KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN 2024*



## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam mendukung Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis BPK RI. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Pencapaian skor kinerja Tahun 2024 sebesar 101,16 yang mana mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 dengan skor kinerja sebesar 99,42.

Komitmen yang kuat untuk mencapai kinerja yang maksimal tergambar pada capaian indikator kinerja sebagai berikut.

1. Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan terealisasi sebesar 100% dari target 100% dengan skor kinerja sebesar 100
2. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan terealisasi sebesar 85,73% dari target 75% dengan skor kinerja sebesar 105,00;
3. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional terealisasi sebesar 101,24% dari target 100% dengan skor kinerja sebesar 101,24;
4. Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan terealisasi 100% dari target 100% dengan skor kinerja sebesar 100;
5. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal terealisasi sebesar 101,37% dari target 100% dengan skor kinerja sebesar 101,37%;
6. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK terealisasi sebesar 4,84 dari target 4,81 dengan skor kinerja sebesar 100,62;
7. Hasil Evaluasi AKIP terealisasi sebesar 91,40 dari target 90,05 dengan skor kinerja sebesar 101,50.
8. Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan terealisasi sebesar 106,88% dari target 100% dengan skor kinerja sebesar 105;
9. Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi terealisasi sebesar 4,17 dari target 3,80 dengan skor kinerja sebesar 105;
10. Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi terealisasi sebesar 100% dari target 100% dengan skor kinerja sebesar 100,00;
11. Tingkat Kinerja Anggaran terealisasi sebesar 92,50% dari target 84,50% dengan skor kinerja sebesar 105.

Sedangkan indikator kinerja yang belum mencapai target adalah:

1. IKU Tingkat Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan terealisasi sebesar 93,46% dari target 100% dengan skor kinerja sebesar 93,46; dan
2. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi terealisasi sebesar 95,62% dari target sebesar 98% dengan skor kinerja sebesar 97,57.

Atas indikator kinerja yang belum mencapai target yang ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur akan melakukan langkah-langkah atau rencana tindak lanjut sebagai berikut:

1. Berperan aktif dalam QA dan QC pemeriksaan untuk mendorong pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan dari Pengendali Teknis, Wakil Penanggung Jawab, dan Penanggung Jawab melalui penyusunan laporan mingguan, diskusi mingguan, dan supervisi pemeriksaan guna menjaga dan meningkatkan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dihasilkan oleh BPK RI;
2. Melakukan *cross review* dan pengecekan berulang atas penyusunan LHP untuk memastikan akurasi dan konsistensi;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan panduan *check list* penjaminan mutu pelaporan hasil pemeriksaan guna meningkatkan ketelitian dan kecermatan dalam proses *review* hasil pemeriksaan;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi CAKEP (Cari Kata Pemeriksaan, Kesekretariatan, dan Pelayanan) sebagai alat kontrol terjadinya kesalahan penulisan;
5. Memanfaatkan Buku Pintar Pemeriksaan LKPD dengan harapan dapat menjadi pelengkap perangkat lunak pemeriksaan LKPD yang selama ini telah tersedia yang meliputi Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan, Kebijakan Pemeriksaan LKPD, Panduan Pemeriksaan LKPD, dan *Frequently Asked Question* (FAQ) sehingga hasil pemeriksaan LKPD di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dapat menghasilkan LHP yang konsisten, akurat, dan berkualitas;
6. Mempertahankan pelaksanaan pemenuhan Pemutakhiran Data Pegawai yang capaiannya sebesar 100%;
7. Melaksanakan *monitoring* secara berkala atas penggunaan aplikasi Jasmin untuk memantau status tindak lanjut atas surat masuk yang ada; dan
8. Setiap pejabat struktural dan pejabat fungsional hingga ketua tim turut mengingatkan dan memonitor penggunaan aplikasi pemeriksaan khususnya saat pengisian dokumen tahapan pemeriksaan pada aplikasi SiAP, SMP, dan SIPTL.

Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja pada IKU Tingkat Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan adalah keterbatasan waktu yang disediakan dalam penyusunan LHP sehingga mempengaruhi kecermatan dan ketelitian dalam penyusunan hasil pemeriksaan sehingga berdampak pada akurasi dan konsistensi LHP yang dihasilkan. Sedangkan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja pada IKU Tingkat Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah adanya perubahan pemeriksaan pada RKP sehingga terdapat pemeriksaan yang tidak terlaksana, namun pada aplikasi SMP dan SiAP obrik hasil revisi belum *update* dan adanya proses pengisian dokumen yang belum lengkap pada SiAP atas pemeriksaan pendahuluan.

Dalam rangka meningkatkan dan memperbaiki kinerja di masa mendatang, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan langkah-langkah strategis, yaitu:

1. Mengevaluasi pencapaian kinerja dari tahun ke tahun;
2. Menyusun rencana aksi pencapaian kinerja; dan
3. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait guna mendorong pencapaian kinerja dan mencari solusi atas hambatan/kendala dalam pencapaian kinerja.

## **BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**